

PROPOSAL PENELITIAN

SEKOLAH YANG TIDAK DIAKUI: PERJUANGAN BELAJAR SISWA INDONESIA DI SABAH MALAYSIA



Oleh

Benny Ridwan dan Mifathuddin

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UIN SALATIGA TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti/penulis dapat menyelesaikan laporan riset dengan judul "*Sekolah yang Tidak Diakui: Perjuangan Belajar Siswa Indonesia di Sabah Malaysia*" dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab akademik sekaligus wujud kepedulian terhadap isu pendidikan bagi anak-anak Indonesia di luar negeri, khususnya di wilayah Sabah, Malaysia, yang hingga kini masih menghadapi tantangan pengakuan formal terhadap lembaga pendidikan mereka.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi, perjuangan, dan strategi bertahan para siswa migran Indonesia dalam memperoleh hak pendidikan. Penelitian ini juga berupaya memberikan wawasan baru bagi para pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat luas agar bersama-sama mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa informasi, data, maupun motivasi, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada para guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua di Sabah yang telah bersedia berbagi pengalaman dan kisah nyata mereka demi kelengkapan penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya di masa mendatang. Semoga laporan riset ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi nyata bagi upaya perbaikan pendidikan anak-anak Indonesia di manapun mereka berada.

Hormat kami

Benny Ridwan dan Mifathuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Penelitian Terdahulu	4
E. Landasan Teori	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II PERJUANGAN BELAJAR SISWA INDONESIA DI SABAH	17
A. CLC (Community Learning Center).....	17
B. Pembentukan dan Pelaksanaan CLC.....	28
C. Perjuangan Belajar Siswa Indonesia	36
BAB III ASPEK PSIKOSOSIAL, KESEHATAN MENTAL SISWA	39
DAN INTEGRASI DI MASYARAKAT	
A. Dampak Sosial dan Kesulitan Integrasi Siswa di Sekolah Tidak Diakui	50
B. Isolasi Sosial: Pengaruh Terhadap Kehidupan Siswa	52
C. Siswa yang Kurang Mendapatkan Dukungan Pendidikan: Tantangan dan Solusi	56
BAB IV PERAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG PENDIDIKAN	63
SISWA INDONESIA DI SABAH	
A. Dimulai dengan Bantuan Buku	67
B. Skema Beasiswa, Pelatihan Guru, Dan Program Pendidikan Lanjutan	70
C. Dampak yang teramati	75
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN SK.....	86

ABSTRAK

Benny Ridwan dan Mifathuddin, *Sekolah Yang Tidak Diakui: Perjuangan Belajar Siswa Indonesia di Sabah Malaysia*, Riset Litapdimas, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, UIN Salatiga, 2024

Pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Sabah, Malaysia, khususnya di sekolah-sekolah yang tidak diakui oleh pemerintah setempat, menghadapi tantangan kompleks. Meskipun demikian, sekolah-sekolah ini tetap beroperasi dengan bantuan terbatas dari pemerintah Indonesia. Peran CLC sebagai solusi pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Sabah. CLC didirikan melalui kerjasama antara pemerintah Indonesia, Malaysia, dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Meskipun memberikan akses pendidikan, CLC menghadapi tantangan seperti kurangnya pengakuan resmi, keterbatasan fasilitas, dan rasio guru-siswa yang tidak seimbang. Siswa di CLC juga mengalami kesulitan integrasi sosial akibat stigma dan perbedaan budaya.

Dampak psikososial dan kesehatan mental siswa di sekolah tidak diakui. Isolasi sosial, kurangnya dukungan pendidikan, dan keterlibatan orang tua yang minim memengaruhi motivasi dan prestasi belajar siswa. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan kualitas guru, fasilitas sekolah, program integrasi sosial, dan edukasi orang tua. Kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun CLC berperan penting dalam menyediakan pendidikan dasar, pengakuan resmi dan dukungan holistik dari berbagai pihak diperlukan untuk memastikan kesetaraan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Sabah. Rekomendasi mencakup advokasi kebijakan, peningkatan sumber daya, dan program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah berupaya mendukung pendidikan anak pekerja migran di Sabah melalui pendirian Community Learning Center (CLC), pengiriman guru, dan program beasiswa seperti Gema Cita. Namun, tantangan seperti keterbatasan fasilitas, status imigrasi, dan distribusi bantuan yang tidak merata masih menjadi hambatan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan dan kebijakan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Sabah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sabah, Malaysia, seperti halnya wilayah lain, memiliki masyarakat yang beragam dengan berbagai tingkat akses ke pendidikan. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, infrastruktur, pertimbangan budaya, dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi peluang pendidikan. Sangat penting untuk menyadari bahwa setiap orang mungkin menghadapi tantangan yang berbeda yang berdampak pada akses mereka terhadap pendidikan yang berkualitas. Berbagai upaya sering dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan akses pendidikan untuk semua. Sangatlah penting untuk mempromosikan pemahaman, kesadaran, dan mendukung inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan pendidikan bagi semua orang.

Pada sisi lain sebanyak 38 sekolah anak Warga negara Indonesia (WNI) atau buruh migran di Negeri Sabah Malaysia tidak terdaftar sebagai sekolah luar negeri karena tidak sesuai ketentuan dari Pemerintah Malaysia (<https://www.antaranews.com/berita/828313/38-sekolah-indonesia-di-sabah-tidak-terdaftar-di-malaysia>). Puluhan sekolah WNI ini berada di wilayah perkotaan di mana Pemerintah Malaysia tidak membenarkan adanya sekolah luar negeri di luar perladangan atau perkebunan. Sekolah- sekolah atau Community learning center (CLC) ini didirikan atas inisiatif WNI atau orang tua anak Indonesia yang bertempat tinggal di kawasan perkotaan yang

letaknya jauh dari Kota Kinabalu. CLC ini tidak diakui sebagai sekolah luar negeri oleh Pemerintah Malaysia karena adanya peraturan yang dikeluarkan bagian yang menangani masalah pendidikan di negara tersebut. Meskipun demikian, demi kelangsungan CLC tidak terdaftar ini tetap diberikan bantuan oleh Pemerintah Indonesia namun jumlahnya terbatas karena hanya diperuntukkan pada pengadaan sarana prasarana saja. Meskipun sekolah-sekolah ini melanggar aturan Malaysia tetapi diberikan kebijaksanaan tetap beroperasi atau melakukan proses belajar mengajar (PBM). Demi kelangsungan pendidikan anak-anak Indonesia di sekitarnya sebagai bentuk kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui KJRI Kota Kinabalu dengan Pemerintah Malaysia. Namun, Pemerintah Malaysia mengingatkan agar tidak menambah lagi sekolah dalam kawasan perkotaan. Sedangkan di ladang-ladang kelapa sawit dan perkebunan tetap diberikan keluasaan mendirikan sekolah atas persetujuan majikan.

Mengenai 38 sekolah WNI yang belum terdaftar ini telah seringkali dibahas antara KJRI Kota Kinabalu dengan Pemerintah Negeri Sabah. Meskipun demikian, KJRI Kota Kinabalu sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia tetap memberikan perhatian kepada 38 sekolah ini dengan memantau dan memberikan bimbingan dan bantuan-bantuan seperti pengadaan sarana prasarana buku, meubel dan kebutuhan lainnya di luar perbaikan gedung atau ruang kelas.

Riset Erna Yayuk dan Dyah Worowirastri (2017) menyebutkan bahwa pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Indonesia luar negeri sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya negeri setempat. Hal ini menjadi salah satu sebab anak-anak Indonesia yang sekolah di luar negeri kurang mengenal budaya Indonesia. Kecuali sebatas pengetahuan yang diberikan di dalam keluarga masing-masing anak. Jika tidak

diperkenalkan semenjak dini mengenai budaya Indonesia maka anak-anak tersebut akan mengalami krisis pengetahuan budaya Indonesia. Untuk itu upaya-upaya revitalisasi budaya Indonesia di Sekolah Indonesia di luar negeri mendesak untuk dilakukan program kerjasama /studi/penelitian. Sementara itu Kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tentu tidak terlepas dari kondisi secara individu maupun keluarga. Berkaitan dengan hal tersebut, kesibukan dan ketidakmampuan dari TKI yang memiliki anak berusia sekolah untuk memenuhi salah satu hak anak yaitu pendidikan menjadi satu hambatan yang masih mengganggu kelangsungan hidup para TKI di Malaysia, (Fauziah, P., Dewi, A., & Trisanti, T: 2023).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi sekolah yang tidak diakui di Sabah, dan dampaknya terhadap proses belajar siswa Indonesia?
2. Apa hambatan yang dihadapi siswa Indonesia dalam mengakses pendidikan di sekolah yang tidak diakui di Sabah?
3. Bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam menangani isu sekolah yang tidak diakui serta mendukung pendidikan siswa Indonesia di Sabah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi kondisi infrastruktur, fasilitas, dan kualitas pengajaran di sekolah Indonesia yang tidak diakui di Sabah, Malaysia.
2. Menganalisis dampak ketidakdiakuinya sekolah terhadap motivasi dan prestasi belajar siswa Indonesia di Sabah.

3. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi siswa Indonesia dalam mengakses pendidikan formal di sekolah yang tidak diakui.
4. Menilai peran pemerintah Indonesia dalam melindungi hak pendidikan siswa Indonesia di luar negeri, khususnya di Sabah, Malaysia.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Riset pertama berasal dari Anna Yulia Hartati dan Rofi'atul Andawiyah, 2020, menyebutkan bawa fenomena banyaknya anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang tidak mendapatkan layanan pendidikan, mengingat anak-anak tersebut juga merupakan aset negara bagi PMI di Indonesia. Berdasarkan hukum nasional dan internasional, pendidikan merupakan hak bagi setiap manusia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pendidikan anak pekerja migran di Sabah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan konsep soft diplomacy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan anak di Sabah, Malaysia, PMI antara lain membentuk SIKK, Community Learning Center (CLC), mengirimkan guru untuk membina, dan membantu dalam pengurusan dokumen-dokumen legal. Diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan ini tergolong dalam metode First track diplomacy, karena dilakukan melalui pemerintah dengan pemerintah (G to G/Government to Government), sifatnya rahasia dan tujuannya untuk menyelesaikan masalah pendidikan anak TKI yang berada di Malaysia.

Riset kedua berasal dari Puji Yanti Fauziah, Adin Ariyanti Dewi, Trisanti Trisanti, 2023 yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi anak-

anak, terutama di tahun-tahun awal mereka. Untuk mengoptimalkannya, peran orang tua dan institusi pendidikan harus saling mendukung. Namun, masih ada beberapa kasus di mana institusi dan orang tua gagal berkolaborasi untuk mendidik anak satu sama lain. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari kegiatan pelatihan dan pendampingan parenting yang dilakukan untuk pengelola Satuan PAUD Sejenis (SPS) dalam upaya memberdayakan pengelola Community Learning Center (CLC). Community Learning Center (CLC) adalah lembaga yang memfasilitasi pendidikan anak pekerja Indonesia yang berada di Sabah, Malaysia. Community Learning Center (CLC) merupakan institusi pendidikan yang menyediakan akses pelayanan pendidikan dasar (SD) bagi anak-anak pekerja ladang berkewarganegaraan Indonesia yang berada di negara Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode campuran, yang merupakan kombinasi dari metode kuantitatif dan kualitatif. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengumpulan data kuantitatif yang disebarakan secara online kepada 50 responden melalui aplikasi grup WhatsApp. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data kualitatif dengan melakukan wawancara kepada 5 responden yang dipilih untuk mewakili populasi melalui aplikasi WhatsApp. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kehadiran pelatihan parenting telah mampu meningkatkan peran pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lembaga SPS, khususnya antara lembaga SPS dengan orang tua yang bekerja sama dalam mendidik anak.

Selanjutnya riset ketiga dari Desy Anastasia Christie, 2016, UPAYAI INDONESIA DALAM MENANGANI PENDIDIKAN ANAK TENAGA KERJA INDONESIA DI SABAH MALAYSIA, menyebutkan bahwa pendidikan anak TKI merupakan isu penting di Sabah,

oleh karena itu menjadi salah satu upaya penting Pemerintah Indonesia dalam menangani pendidikan anak TKI di Sabah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah bekerjasama dengan pemerintah Malaysia dan pihak non-pemerintah seperti Yayasan Humana Child Aid Society. Hasilnya antara kedua negara mendirikan Sekolah Kota Kinabalu (SIKK) dan pusat pembelajaran seperti Community Learning Center (CLC) dan Pemerintah Indonesia juga mengirimkan tenaga pendidik atau guru dari Indonesia yang ditempatkan di pusat pembelajaran di Sabah. Namun ada beberapa kendala yaitu jumlah pusat belajar yang tidak sinergis dengan jumlah guru yang ada karena jumlah anak di setiap pusat belajar sangat banyak, tidak sebanding dengan guru yang ditugaskan untuk mengajar di pusat belajar tersebut.

E. Landasan Teori

Setiap individu memiliki berbagai jenis modal yang dapat mereka manfaatkan sepanjang karir pendidikan mereka. Keberhasilan di sekolah sangat dipengaruhi oleh modal manusia, budaya dan sosial siswa. Modal sosial sangatlah penting. Orang tua membuat keputusan yang mempengaruhi karir sekolah anak-anak mereka berdasarkan jenis modal dan informasi yang tersedia bagi mereka. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang paling banyak dengan investasi yang paling sedikit. Siswa yang tangguh memiliki prestasi yang lebih baik dari yang diharapkan, meskipun mereka memiliki kekurangan secara sosial. Dalam kasus seperti itu, fenomena 'bangkit kembali' terjadi, yang berarti bahwa faktor-faktor yang menghambat disingkirkan dari individu tersebut. Orang yang tangguh tidak hanya melihat aspek positif tetapi juga mampu mengubah hal negatif menjadi keuntungan mereka, (Kumalasari, A., & Huwae, A.: 2023). Fenomena bounce-back berarti bahwa semakin dalam kerugian yang dialami seseorang, maka

mereka akan semakin sukses. Berdasarkan definisi di atas, kita dapat mendiskusikan resiliensi tidak hanya dalam konteks siswa tetapi juga dalam konteks guru. Dalam hal ini, guru yang sukses adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk tetap tangguh baik dalam kehidupan pribadi maupun profesionalnya, yaitu mereka yang mampu menghadapi tantangan dengan cara yang tangguh, fleksibel, mudah beradaptasi, dan kreatif. Teori Sosiologi Pendidikan ini dapat digunakan untuk memahami dampak sosial dari situasi di mana sekolah-sekolah yang tidak diakui. Bagaimana pemisahan sosial ini memengaruhi identitas dan interaksi sosial siswa?

Komunitas yang terlibat dalam pendidikan, mencakup pentingnya komunitas keluarga. Keluarga adalah agen utama sosialisasi. Anak-anak mengenal dunia melalui keluarga, dan pola-pola yang mereka pelajari di sana memiliki dampak seumur hidup. Pendidikan formal dan informal untuk mempersiapkan kehidupan keluarga sangat penting dalam hal bagaimana masyarakat berfungsi. Dalam hal karir sekolah, situasi sosial ekonomi keluarga mempengaruhi kinerja siswa. Pada etnis minoritas, komunitas minoritas memiliki rasa identitas yang jauh lebih kuat daripada rekan-rekan mereka di tempat lain, karena mereka dipaksa untuk menegaskan identitas mereka karena tantangan sehari-hari dan karena itu terlindungi dari asimilasi ke dalam masyarakat mayoritas. Minoritas, kelompok yang berbeda secara budaya, etnis, atau ras yang hidup berdampingan namun berada di bawah kelompok yang lebih dominan. Sebagaimana istilah ini digunakan dalam ilmu sosial, subordinasi ini adalah karakteristik utama dari kelompok minoritas. Dalam kasus minoritas, pilihan sekolah menjadi sangat penting, karena pendidikan dapat diberikan dalam bahasa negara atau bahasa minoritas, (Irzum Fariyah, Afina Izzati, 2016). Konsep ini akan menjelaskan bagaimana siswa mengatasi

tantangan dalam lingkungan belajar yang tidak resmi atau tidak diakui? Bagaimana mereka beradaptasi dengan perbedaan budaya dan sistem pendidikan?

Karena para TKI secara sosial dipisahkan atau dipisahkan dari kekuatan dominan masyarakat, anggota kelompok minoritas biasanya terputus dari keterlibatan penuh dalam cara kerja masyarakat dan dari bagian yang sama dalam penghargaan masyarakat. Dengan demikian, peran kelompok minoritas bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya tergantung pada struktur sistem sosial dan kekuatan relatif kelompok minoritas tersebut. Misalnya, tingkat mobilitas sosial seorang anggota kelompok minoritas bergantung pada apakah masyarakat tempat tinggalnya tertutup atau terbuka. Masyarakat tertutup adalah masyarakat di mana peran dan fungsi individu secara teoritis tidak akan pernah berubah. Sebaliknya, masyarakat terbuka memungkinkan individu untuk mengubah perannya dan mendapatkan keuntungan dari perubahan status yang sesuai.

Pada sisi lain guru di sekolah yang tidak diakui selalu menjadi Komunitas Relawan. Jenis kesukarelawan mereka bersifat tradisional yang menyampaikan nilai-nilai altruistik, sedangkan kesukarelawan guru jenis baru dikaitkan dengan nilai-nilai baru: lebih melayani diri sendiri, baik untuk pengembangan profesional, pengalaman atau rekreasi edukasi. Menjadi sukarelawan dalam dunia pendidikan merupakan sarana untuk menyadarkan siswa dan menanamkan rasa tanggung jawab. Komunitas guru, mulai dari pengambilan keputusan, sampai dengan karir di sekolah, upah, kondisi kerja, dan penghargaan sosial merupakan alasan utama untuk menjadi seorang guru sukarelawan. Waktu mengajar dan waktu bekerja tidaklah sama, kebanyakan orang tidak tahu berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk bekerja, karena jumlah beban kerja mereka

membutuhkan jadwal kerja yang panjang. Altruisme dalam diri relawan tertanam kuat sehingga meningkatkan solidaritas sosial untuk terus berkontribusi di bidang kerelawanan (Annabela Assyfa Wibowo, : 2023).

Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan siswa untuk bekerja, untuk mengajarkan mereka bagaimana cara bertahan di dunia kerja. Ketika menentukan waktu memasuki dunia kerja, jenis-jenis modal muncul lagi, karena situasi ekonomi dan modal ekonomi keluarga juga berdampak pada pekerjaan calon pekerja. Namun, budaya kerja tidak dimulai dari pekerjaan, melainkan dari pengamatan awal terhadap sikap kerja orang tua. Ketidaksetaraan dalam lingkungan spasial, yaitu, efek dari latar belakang orang tua yang berbeda terhadap kemajuan sekolah siswa. Dalam hal lokasi spasial, baik daerah pinggiran eksternal dan internal, yang pertama secara fisik jauh dari pusat kota, sedangkan yang kedua jauh dalam hal pembangunan. Daerah yang kurang beruntung memiliki dampak yang lebih besar daripada daerah yang lebih beruntung, dan bahwa daerah dengan kondisi yang lebih baik memiliki dampak yang lebih besar terhadap hasil yang lebih baik, sementara daerah dengan kondisi yang lebih buruk juga memiliki hasil yang lebih buruk, dengan atau tanpa latar belakang keluarga/sekolah yang kurang beruntung. Transmisi nilai juga terjadi terutama di dalam keluarga TKI, proses kognitif juga terlibat, karena individu menimbang dan memilih berdasarkan pengaruh yang mereka terima. Keterjangkauan lokasi sekolah dan sistem yang memudahkan proses menuju fasilitas pendidikan. Ketersediaan standar pendidikan yang berkualitas bagi warga negara dan ketersediaan guru yang memadai di setiap jenjang pendidikan (Zein, Y., Syaprih, A., & Rohman, A.: 2017).

F. Metode Penelitian

Riset ini bersifat kualitatif. Riset kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Peneliti berusaha memahami makna dan interpretasi dari perspektif informan individu yang terlibat. Oleh karena itu sumber data primer diambil dari hasil observasi, hasil wawancara mendalam, ungkapan, refleksi, dan tindakan dari informan-informan di lapangan. Penelitian ini juga akan menggali data sekunder berupa kesulitan dalam pengakuan hukum dan administratif yang dapat mempengaruhi status sekolah, keberlanjutan pendidikan, dan hak-hak siswa. Menggali peraturan dan kebijakan setempat serta mencari pemahaman mendalam tentang hukum pendidikan di Malaysia dan Indonesia. Lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan wilayah yang memiliki sekolah-sekolah yang tidak diakui oleh pemerintah Malaysia. Oleh karena itu sumber informasi dari informan menjadi sangat penting, baik berupa wawancara mendalam, maupun dialog dengan para tokoh, guru, siswa, orang tua, perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, dan stakeholder lainnya yang dianggap mempunyai kapasitas dalam tema penelitian.

Langkah-langkah metodis yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain: mengumpulkan bahan primer lapangan dan data kepustakaan yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Data lapangan dan kepustakaan yang sudah terkumpul, diidentifikasi dan diklasifikasi dalam kerangka yang berbeda, sehingga akan terlihat jelas perbedaan intensitas kajian data satu dengan yang lainnya. Kemudian menelaah dan membahas persoalan Sekolah yang tidak diakui, perjuangan belajar siswa Indonesia di Sabah Malaysia, para siswa yang belajar di sekolah yang tidak diakui, mungkin menghadapi ketidaksetaraan dalam pendidikan. Masalah ini dapat mencakup kualitas pengajaran, sumber daya pendidikan yang terbatas, dan kurangnya peluang untuk mengembangkan

keterampilan. Selanjutnya merumuskan hasil analisis data sehingga menjadi hasil penelitian yang diuraikan ke dalam bahasa yang konsisten sehingga diperoleh pengertian yang komprehensif dan *holistic* mengenai objek penelitian. Data riset kualitatif ini bersifat deskriptif dan kontekstual. Informasi dikumpulkan juga dalam bentuk teks, suara, atau gambar, dan dianalisis untuk mengungkap pola, tema, dan makna yang mungkin tidak dapat diukur secara numerik.

Reduksi data tidak dapat dihindari dalam penelitian kualitatif, karena berbentuk data verbal yang panjang dan lebar. Data direduksi tanpa mengubah substansinya, (Matthew B Milles and Huberman, Michael A, 2014). Reduksi data merujuk pada proses atau teknik untuk mengurangi jumlah dan kompleksitas data, tanpa mengorbankan informasi yang penting. Tujuan utama dari reduksi data adalah membuat data lebih efisien dan mudah diolah, sehingga dapat meningkatkan kinerja analisisnya. Selanjutnya memilih hanya sebagian dari data yang memenuhi kriteria tertentu atau relevan untuk analisis yang sedang dilakukan. Selanjutnya klasifikasi data dilakukan dengan mengelompokkan berdasarkan tema riset. Tahap berikutnya kemudian mengorganisasikan data penelitian sesuai dengan peta penelitian. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data, (Sugiyono, 2013).

Analisis dilakukan dengan melakukan interpretasi. Melalui metode ini, peneliti akan memberikan interpretasi (L. R. Gay, 1996), mengenai data Sekolah yang Tidak Diakui, perjuangan belajar siswa Indonesia di Sabah Malaysia. Selanjutnya dievaluasi secara kritis dalam kerangka akademik yang terkandung dalam setiap peristiwa yang terjadi. Metode heuristika (Kaelan, 2005), juga digunakan dalam riset ini untuk menemukan suatu pemahaman baru tentang Sekolah Yang Tidak Diakui, Perjuangan

Belajar Siswa Indonesia di Sabah Malaysia. Oleh karenanya metode heuristika digunakan untuk meneliti sebaik mungkin, sehingga penelitian harus kembali kepada asumsi-asumsi dasar dengan latar belakang ideologis, kerangka berfikir kesejarahan, budaya dan interdisipliner.

G. Sistematika Pembahasan

Bab 1 Pendahuluan. Pada bab pendahuluan, peneliti memaparkan latar belakang topik yang dipilih dan apa yang membuat peneliti tertarik untuk membahas tentang Sekolah Yang Tidak Diakui: Perjuangan Belajar Siswa Indonesia di Sabah Malaysia. Bab pertama meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan rencana pembahasan.

Bab 2 peneliti akan memaparkan Profil Sekolah-sekolah yang Tidak Diakui - Jumlah sekolah yang tidak diakui. - Karakteristik utama. b. Perjuangan Belajar Siswa Indonesia - Tantangan utama dan hambatan yang dihadapi. - Dampaknya terhadap prestasi belajar.

Bab 3 peneliti akan menjelaskan Siswa yang belajar di sekolah yang tidak diakui mungkin menghadapi isolasi sosial dan kesulitan dalam integrasi dengan masyarakat setempat. Hal ini bisa memengaruhi aspek psikososial dan kesejahteraan mental siswa. Siswa yang kurang mendapatkan dukungan pendidikan, baik dari segi guru maupun sumber daya pendidikan. Ini dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan yang bisa saja menjadi

masalah jika mereka tidak sepenuhnya menyadari atau memahami pentingnya pendidikan formal, terutama jika sekolah tidak diakui secara resmi.

Bab 4 Peneliti akan menganalisis peran pemerintah Indonesia dalam menangani isu sekolah yang tidak diakui serta mendukung pendidikan siswa Indonesia di Sabah. Pemerintah Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi warga negara Indonesia yang tinggal di Sabah. Ini dapat mencakup pertukaran pelajar, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang diakui oleh kedua negara. Jika dirasa perlu Pemerintah Indonesia dapat melakukan advokasi internasional dan bekerja sama dengan organisasi internasional yang berfokus pada pendidikan untuk mendapatkan dukungan dan pemahaman lebih luas tentang isu pendidikan di Sabah. Selain intervensi pemerintah, masyarakat Indonesia di Sabah juga perlu diberdayakan dengan informasi dan pemahaman tentang hak-hak pendidikan mereka. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam pendidikan.

Bab 5 Kesimpulan : Terdiri dari kesimpulan, kesimpulan adalah jawaban dari tujuan penelitian, dan saran adalah jawaban dari tujuan penelitian. Pada akhir bab ini akan diberikan Rekomendasi untuk Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan pembentukan atau penguatan peran konsulat atau perwakilan khusus di Sabah untuk memberikan dukungan langsung kepada warga negara Indonesia, termasuk dalam masalah pendidikan. Pemerintah Indonesia dapat memberikan bantuan langsung kepada sekolah Indonesia di Sabah atau kepada siswa Indonesia yang mengalami kesulitan finansial dalam memperoleh pendidikan. Bantuan ini dapat berupa beasiswa, peralatan pendidikan, atau dukungan finansial lainnya.

BAB II

PERJUANGAN BELAJAR SISWA INDONESIA DI SABAH

A. CLC (Community Learning Center)

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia, termasuk mereka yang berada di wilayah perbatasan. Otonomi dan penekanan pada masyarakat menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan di mana pun, oleh karena itu Kota Kinabalu, Sabah, mendirikan community learning center (CLC) sebagai wadah untuk membantu seluruh anggota masyarakat. Organisasi ini merupakan sumber daya pilihan yang berkinerja tinggi bagi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

CLC (Community Learning Center) adalah salah satu unit/lembaga yang menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan pendidikan formal non-formal dan pendidikan nonformal. CLC (Community Learning Center) diluncurkan sebagai Pusat Pembelajaran Masyarakat) diluncurkan sebagai bentuk kesepakatan Asia-Pasifik Program Pendidikan untuk Semua (APPEAL) yang diprakarsai oleh UNESCO pada tahun 1998. Kasaju (2008: 2) memberikan batasan tentang CLC sebagai entitas berbasis masyarakat untuk mewujudkan inisiatif yang berfokus pada pemberantasan buta aksara dan pendidikan berkelanjutan berkelanjutan yang berfokus pada pendidikan untuk mendukung Pendidikan Untuk Semua (PUS). Kegiatan yang diselenggarakan antara lain; kecakapan hidup untuk anak putus sekolah anak putus sekolah, anak muda, perempuan, dan mereka yang kurang beruntung dan miskin di pedesaan. Berdasarkan pengertian CLC

tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa CLC memiliki prinsip dasar, yaitu pendidikan yang berasal dari masyarakat, diselenggarakan dan dikelola oleh masyarakat, dan program pendidikan yang diselenggarakan diperuntukkan bagi masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah Dalam kondisi seperti ini, pemerintah 'hanya' sebagai 'stimulan' memberikan rangsangan bagi tumbuh dan berkembangnya CLC dengan berbagai bantuan bagi lembaga dan program-program yang dilaksanakan.

Pendidikan sebagai salah satu hak dasar atau hak asasi yang harus dimiliki oleh setiap orang telah dibahas sejak tahun 1948 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pendidikan dasar menjadi penting kemudian karena pendidikan merupakan aspek strategis dalam kehidupan manusia. Malaysia, sebagai salah satu negara tujuan pekerja migran Indonesia sebagai tempat bekerja. Dari data 2,7 juta jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Malaysia. Permasalahan yang muncul tidak hanya pada administrasi para TKI tetapi juga anak-anak yang mereka bawa untuk bekerja di sana. Hal ini menjadi dilematis karena pemerintah tidak bisa turun langsung karena adanya kendala seperti batas negara dan aturan yang berlaku. Transnational Public-Private Partnership yang kemudian dilakukan antara kedua negara dan pihak ketiga, swasta kemudian dapat memenuhi pendidikan tersebut. CLC atau Community Learning Center merupakan salah satu wujud dari bentuk kerjasama pemerintah dan swasta ini. Dalam hal ini, keterlibatan pihak swasta cukup signifikan dalam pemenuhan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di wilayah Sabah dan Sarawak.

Bahwa peran CLC dalam pendidikan nonformal meliputi, memberikan nilai tambah dalam bentuk keterampilan berupa keterampilan vokasional. Program-program pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh CLC yang menyangkut kebutuhan

masyarakat saat ini dan di masa depan merupakan bentuk inisiasi yang dapat menginspirasi masyarakat. “Pendidikan non-formal saat ini menjadi salah satu prioritas, karena berusaha untuk merespon perubahan yang terjadi di dunia. Hal ini dapat menjawab perubahan di masyarakat (termasuk profil peserta didik) dengan lebih baik daripada pendidikan masyarakat daripada pendidikan klasikal” (Bjornavold, 2000). Saat ini merupakan tantangan besar untuk mensertifikasi institusi yang akan menawarkan pendidikan informal. Program-program tersebut merupakan hasil kreativitas yang dapat menggugah masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh CLC dan mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan perekonomian keluarga.

Community learning center (CLC) sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memainkan peran penting dalam menyediakan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia, khususnya di wilayah seperti Sabah dan Sarawak (U. Wahyudin et al., 2020; M. Hidayat & Nurfitri Hariyani, 2022). Pusat-pusat ini menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas, termasuk orientasi program, keterlibatan pemangku kepentingan, dan proses evaluasi (Emma Himayaturahmah, 2017). Keberhasilan CLC sangat bergantung pada kemampuan manajerial para pemimpin dan kualitas sumber daya manusia (Emma Himayaturahmah, 2017). Di Sabah dan Sarawak, efikasi diri guru dan keterampilan manajemen kelas merupakan faktor kunci dalam meningkatkan pengalaman belajar siswa, mendorong pemikiran kritis, dan meningkatkan motivasi (Ciptro Handrianto et al., 2021). Pendirian CLC merupakan upaya kolaboratif antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, serta perusahaan perkebunan

kelapa sawit, yang menyelaraskan kepentingan mereka untuk memenuhi hak-hak pendidikan anak-anak Indonesia di Malaysia (M. Hidayat & Nurfitri Hariyani, 2022).



Gambar

1: Saat interview dengan guru di CLC Hanim Kinabalu Sabah (16 Mei 2024)

Perbatasan negara merupakan salah satu konsep penting Hubungan Internasional jika tidak ingin mengatakan salah satu yang terpenting. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh melekatnya konsep perbatasan pada negara sebagai aktor utama mengenai isu-isu lintas batas negara. Konsep perbatasan sendiri merupakan satu konsep yang kompleks sebagaimana disampaikan oleh Anssi Paasi et.al (2018) ... [B] orders are not merely lines that divide state spaces from each other. Instead, they are increasingly complex technical and ideological processes and institutions that states mobilize to control all kind of flows, not least of all mobile people. Kompleksitas konsep perbatasan ini juga digarispawahi oleh Michael Eilenberg yang mengatakan bahwa perbatasan merupakan situs dimana kepentingan berbagai aktor mulai dari lokal, nasional dan internasional berkelindan serta dipengaruhi dan mempengaruhi transformasi satu negara. (Eilenberg, 2012) Konsekuensi dari kompleksitas konsep perbatasan bisa terlihat

dari dinamika studi perbatasan yang berasal dari lintas disiplin ilmu mulai dari Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan HI (Newman, 2011).

Kompleksitas konsep perbatasan ini sebenarnya merupakan cerminan dari kondisi di wilayah perbatasan yang menyimpan permasalahan multidimensional. Salah satu contoh dari wilayah perbatasan yang memiliki kompleksitas permasalahan adalah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan (Hidayat, 2015; Sudiar, 2012; Sudiar, 2015)). Secara sosial masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan komunitas yang memiliki akar budaya yang sama (Dayak Iban di Kalimantan Barat, dan Dayak Lundayeh di Kalimantan Utara). Terbentuknya Indonesia dan Malaysia sebagai entitas politik modern kemudian memisahkan komunitas tersebut berdasarkan kewarganegaraannya (Sudiar, 2020). Dari sisi ekonomi, yang paling mencolok adalah adanya ketimpangan kesejahteraan dimana masyarakat yang bermukim di wilayah Malaysia relatif lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat di wilayah Indonesia. Selain itu, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia juga menjadi tempat dimana proyek ekonomi nasional seperti industri perkebunan kelapa sawit berada. Dari sisi politik, wilayah perbatasan kerap menjadi objek perselisihan klaim wilayah teritorial antara kedua negara serta menjadi komoditas politik yang menentukan pasang surut hubungan diplomatic Indonesia-Malaysia. Meski demikian, dalam beberapa kesempatan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia juga menjadi lokus dimana kerjasama internasional yang bersifat strategis dilaksanakan.

Dengan kompleksitas yang dihasilkan oleh serangkaian permasalahan multidimensional tersebut, maka salah satu pertanyaan penting: dalam kondisi apa kerjasama internasional di wilayah perbatasan bisa terlaksana dan sebaliknya, kondisi

apa yang menyebabkan kebuntuan kerjasama di wilayah perbatasan? Mewujudkan pemerataan pendidikan: studi kasus Community Learning Center (CLC) di Kinabalu, Sabah, Malaysia dan di perbatasan Indonesia-Malaysia Salah satu tulisan penting yang bisa membantu menjawab pertanyaan tersebut datang dari Moch Faisal Karim (2019) yang menyelidiki faktor dinamika internal, khususnya pada Indonesia yang bisa berperan sebagai pendorong sekaligus sebagai penghambat kerjasama antar kedua negara. Dinamika internal ini berakar dari iklim politik desentralisasi dan fragmentasi yang menyebabkan munculnya gesekan kepentingan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Meminjam kerangka berfikir yang disediakan oleh Karim tersebut, maka hasil tulisan riset ini berupaya untuk memberikan kontribusi dalam deskripsi kerjasama Indonesia-Malaysia dalam penanganan permasalahan pendidikan bagi anak buruh migran yang ada di wilayah Kinabalu, Sabah, Malaysia dan di sepanjang perbatasan Kalimantan Utara-Negeri Sabah. Ketimpangan kesejahteraan serta keberadaan industri perkebunan kelapa sawit menjadi daya tarik bagi buruh migran untuk bekerja di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Tercatat ada sebanyak 329.077 buruh migran serta 56.000 anak buruh migran yang berada di Negeri Sabah per tahun 2019 (Hariyani, 2020). Banyaknya jumlah anak buruh migran Indonesia yang berada di Negeri Sabah menimbulkan permasalahan kompleks terkait dengan pemenuhan hak pendidikan bagi mereka.

Di satu sisi, baik Pemerintah Malaysia maupun Indonesia menyadari betul bahwa akses terhadap pendidikan merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dilepaskan dari setiap orang. Namun disisi lain terdapat aspek kedaulatan yang terwujud dalam

regulasi mengenai apapun yang terjadi di dalam batas-batas teritorial negara. Pemerintah Malaysia sejatinya tidak menutup akses pendidikan bagi anak buruh migran Indonesia yang ingin bersekolah di sekolah milik pemerintah Malaysia. Hanya saja Pemerintah Malaysia mempersyaratkan adanya dokumen kependudukan resmi seperti akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia atau paspor orang tua siswa yang berstatus pekerja profesional seperti perwakilan negara atau salah satu orang tua siswa merupakan warganegara Malaysia (Purbayanto, 2014).

Tidak semua anak buruh migran Indonesia di Negeri Sabah memiliki dokumen kependudukan resmi. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya pernikahan yang tidak terdaftar di antara buruh migran Indonesia sehingga anak mereka pun tidak memiliki dokumen kependudukan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Malaysia. Alternatif bagi anak buruh migran yang tidak memiliki dokumen resmi ini adalah sekolah swasta yang biayanya tidak terjangkau oleh mereka. Hal inilah yang kemudian membuat banyak anak buruh migran Indonesia di Negeri Sabah tidak dapat mengakses pendidikan formal.

Untuk mengatasi masalah itu maka Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) pada tahun 2008 sebagai ekstensi dari tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk memberikan hak pendidikan kepada anak buruh migran di Negeri Sabah. Meski demikian SIKK ternyata belum mampu melayani hak pendidikan bagi semua anak buruh migran Indonesia antara lain karena: 1) daya tampung yang terbatas; 2) jarak menuju SIKK yang relatif jauh (Hariyani, 2020).

Menghadapi permasalahan ini maka Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali membahas solusi yang bisa membantu terpenuhinya hak pendidikan anak buruh migran Indonesia di Negeri Sabah yang tidak bisa diakomodir oleh SIKK. Untuk itulah pada tahun 2011 kedua negara sepakat dengan pembentukan Community Learning Center (CLC) yang berfungsi sebagai institusi penyedia pendidikan formal yang berada di lokasi perkebunan kelapa sawit tempat orangtua mereka bekerja. CLC menjadi solusi bagi anak buruh migran Indonesia yang tidak bisa bersekolah di SIKK .

Sejatinya CLC bisa dikatakan sebagai implementasi dari Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat sekitar yang dalam perjalanannya berada dibawah kendali dari Pemerintah Indonesia dan Malaysia. Oleh karenanya CLC merupakan prakarsa tiga pihak yakni: Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia, dan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai penyedia lahan dan prasarana CLC. Hingga tahun 2019, tercatat ada 250 CLC yang tersebar di beberapa daerah di Negeri Sabah (CLC SIKK Kinibalu, 2020).

Sebagaimana yang disinggung pada bagian sebelumnya, hasil riset ini akan mendeskripsikan bagaimana sinergitas serta kerjasama lintas-batas negara (cross-border cooperation) yang dilakukan oleh tiga aktor tersebut dalam pemenuhan hak pendidikan anak buruh migran Indonesia di Negeri Sabah sebagai kontribusi untuk pengayaan diskursus studi perbatasan Indonesia. Untuk membantu memahami permasalahan yang diangkat pada hasil riset ini maka kita bisa melihat bagaimana kerjasama lintas batas negara antar aktor di kawasan perbatasan terjadi. Salah satu studi yang bisa dijadikan rujukan utama adalah tulisan Moch Faisal Karim (2019) yang berjudul *State transformation and cross-border regionalism in Indonesia's periphery: contesting*

the centre. Argumen utama yang diusung Karim adalah bahwa kerjasama lintas batas negara di kawasan perbatasan bisa dijelaskan melalui pendekatan state transformation dimana kawasan perbatasan ditempatkan sebagai arena kontestasi otoritas antar aktor yang berbeda untuk memperebutkan sumberdaya. Kontestasi ini dimungkinkan setelah adanya reformasi di Indonesia yang melahirkan desentralisasi serta fragmentasi.

Masa pemerintahan terpusat sebagaimana terjadi pada era Order Baru kini digantikan dengan adanya lapisan-lapisan otoritas tidak hanya berupa pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Menurut Karim, kerjasama lintas batas negara akan terjadi ketika kepentingan elit/pemangku kebijakan pada lapisan-lapisan otoritas ini beriringan (align) dan sebaliknya, ketika kepentingan elite/pemangku kebijakan pada level yang berbeda ini saling bertentangan atau tidak sesuai, maka kerjasama tidak akan terjadi. Karim mencontohkan kasus terhambatnya kerjasama Indonesia-Singapura terkait Zona Perdagangan Bebas di Batam serta berhasilnya kerjasama di bidang pembangunan perkebunan kelapa sawit antara Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak sebagai bukti bahwa kesesuaian/ketidaksesuaian kepentingan antar aktor pada level otoritas yang berbeda dalam iklim politik desentralisasi dan fragmentasi sangat menentukan keberhasilan/kegagalan dari kerjasama lintas batas negara di kawasan perbatasan.

Landasan berfikir yang digunakan oleh Karim ini sebenarnya telah terlebih dahulu dilontarkan oleh Michael Eilenberg (2012) yang juga menempatkan bahwa kawasan perbatasan sebagai lokasi kontestasi otoritas dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Namun Eilenberg mengikutsertakan aktor yang lebih luas dibandingkan dikotomi

pemerintah pusat-daerah, yakni melibatkan juga komunitas adat setempat serta perusahaan multinasional yang beroperasi di kawasan perbatasan.

Riset ini meminjam kerangka pikir yang dibuat oleh Karim namun dengan sedikit modifikasi untuk memahami dan mendeskripsikan kerjasama lintas batas negara antar aktor di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara-Negeri Sabah. Jika Karim melihat kasus yang diangkatnya melalui perspektif fragmentasi antar aktor di dalam negeri, maka riset ini melihat fragmentasi antar tiga aktor yang terlibat dalam pembentukan CLC, yakni: Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dengan keberhasilan pembentukan CLC, maka bisa diasumsikan bahwa terdapat keselarasan serta upaya untuk penyelarasan kepentingan di antara ketiga aktor tersebut untuk mengatasi permasalahan pemenuhan hak pendidikan bagi anak buruh migran Indonesia di Negeri Sabah.

B. Pembentukan dan Pelaksanaan CLC

Permasalahan rendahnya akses pendidikan bagi anak buruh migran Indonesia ini sebenarnya sudah mulai dibicarakan oleh kedua negara pada tahun 2004 melalui Annual Consultation yang menghasilkan kesepakatan bahwa Indonesia diizinkan untuk mengirimkan guru-guru ke Negeri Sabah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak buruh migran Indonesia. Kesepakatan ini kemudian diperkuat pada tahun 2006 yang menghasilkan kesepakatan pembentukan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK). Setelah mendapat izin dari pemerintah Indonesia dan Malaysia, maka terhitung mulai tanggal 1 Desember 2008, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) mulai beroperasi (SILN, 2016).

Namun sebagaimana yang disinggung sebelumnya, keberadaan SIKK ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seluruh anak buruh migran Indonesia karena faktor lokasi yang jauh serta daya tampung SIKK yang terbatas. Untuk itulah Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali mengadakan pertemuan di Lombok pada tahun 2011 untuk mengeluarkan Joint Statement yang membahas khusus terkait pendidikan anak buruh migran Indonesia di perkebunan Sawit. Pada pertemuan tersebut kedua negara menyepakati pembentukan Community Learning Center yang dijadikan sebagai program pendidikan bagi anak buruh migran di perkebunan sawit dan dibawah koordinasi Sekolah Indonesia Kota Kinabalu.

Community Learning Center (CLC) merupakan pusat kegiatan belajar masyarakat Indonesia yang berperan sebagai lembaga pendidikan yang dibentuk atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat setempat, khususnya perusahaan perkebunan sawit juga masyarakat lokal setempat di Sabah-Sarawak serta didukung dan dibina oleh Pemerintah Indonesia.

Pembentukan Dalam pembentukan CLC di Sabah, pemerintah Indonesia diwakili oleh Kedutaan Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu (KJRI-KK) yang melakukan proses permohonan izin berkoordinasi dengan pihak pemerintah Malaysia yang diwakili oleh Jabatan Pelajaran Negeri Sabah (JPNS). Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) sebagai perpanjangan tangan bidang Penerangan Sosial dan Budaya KJRI Kota Kinabalu kemudian melalui Divisi Community Learning Center (CLC) SIKK melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak perusahaan Sawit. CLC di Sabah telah berjalan sejak tahun 2011 dan telah menjalankan berbagai program dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak buruh migran Indonesia di Sabah (CLC SIKK Kinibalu, 2020).

Pelaksana program CLC di Sabah adalah divisi Community Learning Center (CLC) Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dan pihak perusahaan sawit di Sabah. Dalam pelaksanaan program keduanya memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan garis panduan Kementerian Pelajaran Malaysia, pihak perusahaan sawit adalah pihak yang membuat kesepakatan sesuai dengan kebutuhan pendidikan bagi anak buruh migran Indonesia di perkebunannya. Pihak perusahaan juga menyediakan sarana pengajaran dalam hal ini fasilitas sekolah dan harus ditaati bersama dengan SIKK. Pihak SIKK dalam hal ini berperan sebagai penyelenggara program di tempat yang telah disediakan oleh pihak perusahaan sawit dan menjalankan program CLC kepada anak buruh migran Indonesia yang tinggal di area perkebunan. Dalam pelaksanaan program CLC untuk mengatasi persoalan pendidikan anak buruh migran Indonesia, Divisi CLC SIKK melaksanakan tugasnya dengan menyesuaikan edukasi dengan kurikulum Indonesia.



Gambar 2: Peneliti diberi kesempatan untuk memberikan motivasi pada siswa CLC

Para guru yang terlibat dalam CLC ini merupakan Warga Negara Indonesia yang diseleksi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk kemudian dikirim ke lokasi CLC di Negeri Sabah sebagai Guru Bina. Syarat kelayakan

dan seleksi ini diatur oleh pemerintah Indonesia berdasarkan kesepakatan kedua negara bahwa dalam menentukan kelayakan mengajar seorang guru di CLC adalah berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Guru Bina melakukan pembimbingan dan pembekalan terhadap beberapa orang yang terqualifikasi untuk dilatih menjadi tenaga pendidik yang bertugas untuk membantu masyarakat sebagai Guru Pamong. Perusahaan selaku penanggung jawab CLC merekrut Guru Pamong sebagai tenaga pendidik berdasarkan rekomendasi guru Bina.

Guru Pamong merupakan tenaga pendidik yang berasal dari warga negara Indonesia, Malaysia dan Filipina yang telah lama bermukim di sekitar CLC dan memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan CLC yang dinilai oleh guru Bina dan direkomendasikan kepada pihak perusahaan. Keberadaan guru Pamong sangat membantu memaksimalkan layanan pendidikan dalam program CLC dan terus berkembang seiring berjalannya waktu dengan bantuan guru Bina dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu dalam berbagai program peningkatan kompetensi guru.

Pada bagian sebelumnya kita bisa melihat bagaimana implementasi CLC yang melibatkan koordinasi antara tiga aktor yakni Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sebagaimana argumen yang disampaikan pada bagian awal, kerjasama lintas batas negara ini dimungkinkan ketika adanya keselarasan kepentingan di antara aktor-aktor yang terlibat. Dengan demikian kesuksesan pelaksanaan CLC ini dimungkinkan karena kepentingan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia dan perusahaan perkebunan kelapa sawit selaras.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan pendidikan anak buruh migran Indonesia di Negeri Sabah. Sebagai

"negara asal", sudah barang tentu Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan setiap warga negaranya sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Ayat 1-5 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat 1 dan 2 UUD 1945 bahkan secara eksplisit menyebutkan bahwa.. (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan...(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kepentingan Indonesia dalam kasus ini adalah pelaksanaan konstitusi yang memuat kewajiban negara untuk memenuhi hak pendidikan warganegaranya baik di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk bagi anak buruh migran Indonesia di Negeri Sabah.

Hal yang sama juga berlaku bagi Pemerintah Malaysia. Meskipun Malaysia mengakui Universal Declaration of Human Rights yang memuat pernyataan bahwa semua orang berhak atas pendidikan, namun di satu sisi Pemerintah Malaysia juga memiliki serangkaian regulasi yang tidak serta merta bisa diabaikan begitu saja dalam kasus pendidikan anak buruh migran Indonesia ini. Salah satu contohnya adalah Malaysian Immigration Act Number 1154 A/2002, pemerintah malaysia melarang buruh migran non-profesional di Malaysia untuk membawa keluarga ataupun menikah selama kontrak kerja. Dengan adanya peraturan ini, perkawinan yang tidak terdaftar secara sah menyebabkan anak-anak buruh migran Indonesia tidak memiliki dokumen dan izin tinggal di Malaysia. Tanpa adanya dokumen resmi maka anak buruh migran Indonesia tidak bisa mendaftarkan diri ke sekolah milik Pemerintah Malaysia. Meskipun permasalahan ini menyangkut hak pendidikan bagi anak, namun otoritas Pemerintah Malaysia dalam mengatur tatanan sosial di dalam teritorinya merupakan suatu kedaulatan yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk . untuk itu, kepentingan Pemerintah Malaysia

pada kasus ini adalah mempertahankan otoritas dan kedaulatan regulasi yang berada di wilayah Malaysia.

Adapun bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit, logika yang digunakan disini adalah logika keberlangsungan bisnis, dimana pihak perusahaan harus bisa mengamankan bisnis mereka dari ancaman yang bisa datang dari isu-isu sosial seperti penindasan terhadap hak buruh atau perusahaan yang baik dengan lingkungan sekitar. Untuk itulah, perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam kasus ini dengan terbuka menerima "arahan" dan "perintah" dari kedua negara untuk memfasilitasi pembentukan dan pemenuhan sarana serta prasarana CLC pada lokasi perkebunan mereka. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menghindari adanya tekanan yang bisa datang dari masyarakat Indonesia maupun Malaysia yang menuding perusahaan tidak memperhatikan lingkungan sosial di sekitar area bisnis mereka.

Implementasi dari CLC sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelumnya mendeskripsikan bagaimana keselarasan kepentingan tiga aktor yang terlibat. Pemerintah Indonesia melalui SIKK bisa menjangkau anak buruh migran yang berada di lokasi perkebunan kelapa sawit dan memberikan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Indonesia serta diajarkan oleh guru dari Indonesia. di satu sisi Pemerintah Malaysia juga bisa menegakkan regulasi mereka terkait dengan administrasi kependudukan. Koordinasi strategis yang dilakukan oleh Kedutaan Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu dan Jabatan Pelajaran Negeri Sabah memungkinkan adanya medium bagi Pemerintah Indonesia untuk "hadir" di wilayah mereka tanpa mengganggu kedaulatan Malaysia. Pada saat yang bersamaan, perusahaan perkebunan di Negeri Sabah bisa menjadikan CLC sebagai wujud *compliance* mereka kepada Malaysia dan

Indonesia dalam hal kewajiban perusahaan terhadap lingkungan sekitar dalam bentuk Corporate Social Responsibility.

Community Learning Centre (CLC) kebanyakan merupakan pendidikan dasar yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk anak-anak pekerja migran Indonesia di perkebunan kelapa sawit di Sabah, Malaysia. Efikasi diri guru dan manajemen kelas merupakan isu penting dalam pendidikan disana, termasuk untuk anak-anak Indonesia di luar negeri. Efikasi diri berarti keyakinan guru untuk menunjukkan kualitas dan kompetensi yang baik dalam praktik belajar-mengajar. Guru yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa. Mereka memiliki kepercayaan diri untuk menemukan solusi secara efektif. Sementara itu, manajemen kelas adalah upaya guru untuk mengawasi kegiatan kelas seperti pelatihan, interaksi kelompok, dan kinerja peserta didik. Keberhasilan pembelajaran ditentukan sejauh mana guru dapat mengelola kelasnya. Kelas yang baik bukanlah kelas yang diam, tetapi membuat siswa lebih berpartisipasi dalam proses belajar-mengajar. Dalam konteks CLC Sabah, efikasi diri guru dan kontrol kelas adalah konsep utama untuk meningkatkan pembelajaran siswa Indonesia. Ada beberapa dampak yang menguntungkan bagi siswa jika guru mereka memiliki self-efficacy yang tinggi dan pendekatan yang menjanjikan dalam pengelolaan kelas, yaitu: (1) Siswa bertemu dengan sosok yang dapat dipercaya dan membantu menyelesaikan masalah mereka; (2) Siswa menikmati proses belajar-mengajar karena guru memberikan kesederhanaan dari materi dan konsep yang rumit; (3) Siswa lebih percaya diri dan aktif berpartisipasi di dalam kelas; (4) Siswa akan memiliki pemikiran yang kritis dan dapat dengan cepat menjawab pertanyaan-

pertanyaan; (5) Siswa memiliki motivasi yang tinggi dan berusaha sebaik mungkin dalam belajar demi kesuksesan mereka di masa depan.

C. Perjuangan Belajar Siswa Indonesia

Pendidikan anak-anak Indonesia di Sabah, Malaysia menghadapi tantangan yang cukup besar, dengan lebih dari 50.000 anak tidak memiliki akses yang layak terhadap pendidikan (Suspalupi et al., 2019; Yuvanti, 2021). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai inisiatif, termasuk mengirimkan guru ke Sabah sejak tahun 2006 (Suspalupi et al., 2019) dan mendirikan CLC atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Yuvanti, 2021). Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk menyediakan pendidikan dasar yang berkualitas dan melindungi hak-hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan inovatif, seperti memanfaatkan literatur anak dan video animasi untuk meningkatkan pembelajaran bahasa (Apriyani et al., 2024). Namun, sistem pendidikan ganda di Sabah menghadirkan tantangan yang unik, di mana para siswa mengalami kurikulum yang berbeda dan mempraktikkan perilaku “alih kode” dalam interaksi mereka (Saefudin et al., 2024). Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, dukungan dari pemerintah Indonesia dan Malaysia, serta LSM, berkontribusi dalam mempertahankan identitas nasional dan mendorong peluang pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia di Sabah.

Masalah sulitnya akses pendidikan di Sabah adalah disebabkan oleh ketentuan pemerintah Malaysia dalam Akta Tenaga Kerja 2001 dan Akta Pendidikan 2001 bahwa setiap pekerja migran dan pelajar asing harus memiliki dokumen resmi yang lengkap. Sebagian besar keturunan pekerja migran Indonesia yang lahir di Sabah tidak

memiliki dokumen resmi sehingga tidak dapat bersekolah di sekolah nasional Malaysia. Untuk melaksanakan amanat konstitusi, sejak tahun 2006 pemerintah Indonesia melalui kesepakatan melalui kesepakatan Konsultasi Tahunan dengan Pemerintah Malaysia setiap tahun menugaskan guru-guru untuk mendidik anak-anak Indonesia di Malaysia yang belum tersentuh layanan pendidikan. Guru merupakan komponen yang paling penting dalam mencapai kebutuhan nilai sosial yang diharapkan dari sebuah pendidikan. Maka dari itu pemerintah Indonesia mengupayakan mekanisme pengiriman guru yang profesional demi tercapainya tujuan. Pada tahun ajaran 2016/2017 saja jumlah guru Indonesia yang bertugas di Sabah Malaysia berjumlah 322 orang.

BAB III

ASPEK PSIKOSOSIAL, KESEHATAN MENTAL SISWA DAN INTEGRASI DI MASYARAKAT

Peneliti akan menjelaskan Siswa yang belajar di sekolah yang tidak diakui mungkin menghadapi isolasi sosial dan kesulitan dalam integrasi dengan masyarakat setempat. Hal ini bisa memengaruhi aspek psikososial dan kesejahteraan mental siswa. Siswa yang kurang mendapatkan dukungan pendidikan, baik dari segi guru maupun sumber daya pendidikan. Ini dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan yang bisa saja menjadi masalah jika mereka tidak sepenuhnya menyadari atau memahami pentingnya pendidikan formal, terutama jika sekolah tidak diakui secara resmi.

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan dampak yang dihadapi siswa yang belajar di sekolah-sekolah yang tidak diakui secara resmi, baik dari aspek psikososial maupun kesehatan mental mereka. Siswa yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah tersebut sering kali mengalami isolasi sosial, kesulitan dalam integrasi dengan masyarakat, dan terbatasnya dukungan pendidikan, yang pada akhirnya memengaruhi potensi akademis mereka. Selain itu, peran dan keterlibatan orang tua juga menjadi faktor penting, terutama jika mereka tidak sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan formal.

Anak-anak Indonesia yang tinggal di perkebunan kelapa sawit, perkebunan teh, dan pabrik seringkali tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah seperti paspor, visa

masuk, dan izin tinggal. Status imigrasi orang tua mereka biasanya ilegal, dan tempat tinggal mereka tidak stabil, tanpa alamat tetap. Selain itu, rumah mereka seringkali jauh dari lokasi sekolah, dengan waktu tempuh dua hingga tiga jam perjalanan dan terbatasnya pilihan transportasi umum yang tidak terjangkau oleh pekerja migran. Ketersediaan sekolah juga menjadi masalah bagi warga negara Indonesia, dan kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya dan manfaat pendidikan bagi anak-anak mereka juga dapat menjadi kendala. Masalah-masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh siswa dan orang tua mereka, mengakibatkan WNI tidak dapat untuk mengakses layanan pendidikan. Akibatnya, dari 50.000 anak di Sabah, 36.000 di antaranya berisiko buta huruf. Konsulat Indonesia di Tawau Sabah melaporkan bahwa 50.000 pekerja migran di Sabah tidak memiliki identitas resmi, dan anak-anak dari banyak pekerja migran ini juga tidak berdokumen. Hal ini disebabkan oleh peraturan imigrasi dan ketenagakerjaan Malaysia yang tidak mengizinkan pekerja asing untuk membawa keluarga mereka. Pihak konsulat mengakui kesulitan dalam menyediakan dokumen untuk anak-anak pekerja migran yang tidak mampu karena orang tua mereka menolak untuk melaporkan atau mengurus dokumen anak-anak mereka. Kesulitan untuk mendapatkan identifikasi yang tepat ini berarti bahwa banyak dari mereka anak-anak ini tidak menerima pendidikan. Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah Indonesia telah mendirikan sekolah-sekolah dengan kurikulum Indonesia yang disebut Community Learning Center (CLC) di berbagai lokasi, dengan dukungan dari universitas-universitas dan perusahaan swasta di Indonesia dan Malaysia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga berkolaborasi dengan pemerintah pusat Malaysia untuk mengatasi tantangan pendidikan ini. Guru-guru dari Indonesia juga dikirim ke sekolah-sekolah tersebut untuk memberikan

pendidikan kepada anak-anak pekerja migran Indonesia. Melalui upaya-upaya ini, pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesempatan dan hasil pendidikan bagi keluarga pekerja migran Indonesia di Malaysia. Namun sayangnya Community Learning Center (CLC) belum diakui oleh pemerintah setempat.

Dalam dunia pendidikan, keberadaan sekolah yang diakui secara resmi oleh pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin standar kualitas pendidikan. Namun, tidak semua sekolah memenuhi standar ini, dan siswa yang belajar di sekolah yang tidak diakui menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima, tetapi juga memengaruhi perkembangan psikososial dan kesejahteraan mental siswa. Faktor keterlibatan orang tua juga menjadi sangat signifikan dalam menentukan dampak jangka panjang pada siswa.

Erik Erikson menjelaskan bahwa perkembangan identitas anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, termasuk sekolah. Siswa yang tidak mendapatkan akses pada lingkungan pendidikan yang diakui mungkin mengalami kesulitan dalam perkembangan sosialnya. Menurut penelitian psikologi perkembangan, kesejahteraan mental anak berkaitan erat dengan dukungan yang diterima dari lingkungan pendidikan, teman sebaya, dan keluarga. Keterbatasan dukungan dapat menyebabkan penurunan motivasi dan bahkan depresi. Bronfenbrenner dalam teori ekologi perkembangan menyatakan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan adalah faktor kunci dalam pencapaian akademis siswa.

Siswa yang belajar di sekolah yang tidak diakui sering mengalami isolasi sosial. Mereka merasa terasing dari siswa lain di masyarakat yang belajar di sekolah formal, yang membuat mereka kesulitan dalam membangun identitas sosial yang kuat. Hal ini berpengaruh pada rasa percaya diri mereka, terutama ketika mereka harus berinteraksi di luar lingkungan sekolah. Siswa di sekolah yang tidak diakui sering kali menghadapi kekurangan fasilitas dan sumber daya. Guru yang kurang berkualitas atau terbatas jumlahnya, menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Kondisi ini membatasi perkembangan akademis siswa dan menghambat potensi maksimal mereka. Keterlibatan orang tua sering kali terbatas, terutama ketika orang tua tidak memahami pentingnya pendidikan formal. Dalam banyak kasus, orang tua lebih fokus pada kebutuhan ekonomi dengan bekerja penuh waktu, sehingga pendidikan anak kurang menjadi prioritas. Kurangnya pemahaman ini membuat siswa sulit mendapatkan dukungan yang memadai dari keluarga.

Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang belajar di sekolah yang tidak diakui menghadapi tantangan signifikan yang memengaruhi perkembangan psikososial dan kesejahteraan mental mereka. Terbatasnya dukungan pendidikan dan keterlibatan orang tua yang kurang optimal juga menghambat potensi akademis mereka. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perhatian dari pemerintah untuk mengakui sekolah-sekolah yang memenuhi standar tertentu, serta edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan formal. Untuk itu pemerintah perlu melakukan pemetaan dan penilaian terhadap sekolah-sekolah yang belum diakui untuk menentukan langkah intervensi yang tepat. Pelatihan untuk guru dan peningkatan fasilitas di sekolah-sekolah ini perlu dilakukan guna menjamin mutu pendidikan yang memadai. Memberikan pelatihan

berkelanjutan dan kesempatan pengembangan bagi guru dengan program terukur dan terkendali. Ini bisa dilakukan dengan memberikan akses kursus online, program pertukaran, atau pelatihan intensif agar guru memiliki metode pengajaran yang inovatif dan efektif. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus bekerja untuk memastikan bahwa semua sekolah memiliki akses yang sama terhadap buku, teknologi, dan alat bantu pembelajaran lainnya. Bantuan dari sektor swasta dan organisasi nirlaba juga bisa membantu mengisi kekurangan ini. Program untuk menyediakan akses internet dan perangkat teknologi murah untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil dapat membantu siswa mengakses sumber daya digital dan pembelajaran daring, yang pada akhirnya dapat memperluas cakrawala pengetahuan mereka. Kegiatan ekstrakurikuler yang diarahkan pada pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan akademik dapat memberikan siswa pengalaman belajar yang lebih menyeluruh dan beragam. Selanjutnya menyelenggarakan Edukasi bagi orang tua mengenai pentingnya pendidikan formal untuk masa depan anak perlu ditingkatkan melalui berbagai program sosialisasi dan penyuluhan.

Dukungan pendidikan adalah fondasi yang penting dalam perkembangan anak dan pembentukan potensi mereka. Siswa yang kurang mendapatkan dukungan pendidikan, baik dari segi guru maupun sumber daya, cenderung mengalami kesulitan dalam mencapai prestasi akademik, keterampilan sosial, serta perkembangan diri yang optimal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan tenaga pendidik yang berkualitas, kurangnya fasilitas dan bahan ajar yang memadai, serta kendala dalam akses pendidikan di daerah terpencil. Faktor-faktor tersebut saling terkait

dan berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima siswa, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka.



Gambar 1: Salah satu fasilitas ruang kelas atau ruang belajar siswa. (16 Mei 2024)

Guru adalah aktor kunci dalam proses pembelajaran siswa. Mereka tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi juga sebagai mentor, pembimbing, dan motivator. Namun, banyak sekolah, terutama di daerah Sabah Malaysia yang sangat terpencil, menghadapi kendala dalam memperoleh tenaga pengajar yang berkualitas. Keterbatasan dalam pelatihan guru atau kesempatan pengembangan profesional menyebabkan banyak guru di daerah tersebut tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menerapkan metode pengajaran modern yang efektif. Akibatnya, mereka mungkin kesulitan dalam menjelaskan materi secara efektif atau memotivasi siswa untuk belajar. Banyak guru yang ditempatkan di daerah tersebut kurang terjangkau harus mengajar lebih dari satu kelas atau bahkan satu mata pelajaran yang bukan bidang keahlian mereka. Hal ini dapat mengurangi waktu dan perhatian yang bisa mereka

berikan kepada masing-masing siswa, yang berpengaruh pada efektivitas pembelajaran. Ketika guru tidak dapat mendukung siswa secara memadai, maka siswa tidak hanya kehilangan kesempatan untuk memahami materi pelajaran dengan baik, tetapi juga kesempatan untuk mendapat bimbingan dan arahan yang tepat, yang sangat berharga dalam perkembangan akademik dan pribadi mereka.

Sumber daya pendidikan yang mencakup buku teks, laboratorium, alat bantu visual, dan teknologi sangat diperlukan untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan efektif. Namun, banyak sekolah di wilayah Sabah ini yang kurang didukung dalam hal ini. Siswa yang tidak memiliki akses pada buku pelajaran atau alat bantu lain akan kesulitan dalam memahami konsep yang abstrak atau rumit. Keterbatasan sumber daya ini juga menghambat kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri dan kreatif. Di era digital, akses ke internet dan perangkat komputer merupakan kebutuhan mendasar bagi siswa agar bisa mengakses informasi terbaru dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Tanpa dukungan teknologi, siswa akan tertinggal dari perkembangan zaman, terutama dalam bidang yang memerlukan literasi digital. Ketidakadaan sumber daya ini menyebabkan ketimpangan pendidikan antara siswa yang mampu mengakses fasilitas modern dan mereka yang tidak. Ketidaksetaraan ini akan berdampak pada kesiapan mereka dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.

Dukungan pendidikan yang rendah dari sisi guru dan sumber daya jelas berdampak langsung pada psikologis siswa. Kurangnya bimbingan dan kurangnya akses pada alat belajar membuat mereka merasa tertinggal dari teman-teman mereka di daerah

lain. Ketika siswa merasa bahwa mereka tidak mendapatkan fasilitas yang sama seperti siswa lain, mereka cenderung kehilangan minat untuk belajar karena merasa tidak adil atau merasa usahanya sia-sia. Kurangnya pencapaian karena keterbatasan dukungan juga bisa membuat siswa merasa kurang mampu dan meragukan potensi diri mereka. Ini akan berpengaruh pada kemampuan mereka dalam berpartisipasi aktif di kelas atau bahkan dalam mengambil kesempatan pendidikan di luar kelas. Motivasi dan kepercayaan diri yang rendah bisa membentuk pola pikir negatif pada siswa, di mana mereka akan cenderung menghindari tantangan atau kesempatan baru karena takut gagal atau merasa tidak layak. Dukungan yang tidak memadai dari guru dan sumber daya pendidikan juga berkaitan erat dengan rendahnya pencapaian akademik siswa. Tanpa panduan yang jelas dan alat bantu yang memadai, banyak siswa tidak dapat menyerap pelajaran dengan baik. Hasil belajar siswa yang tidak optimal akan tercermin dalam nilai akademik mereka. Ketika siswa terus-menerus mendapat nilai rendah, mereka bisa kehilangan motivasi untuk memperbaiki diri, yang membuat mereka semakin tertinggal. Sekolah adalah tempat di mana siswa belajar keterampilan sosial dan emosional, seperti kolaborasi, komunikasi, dan manajemen diri. Kurangnya dukungan dari guru bisa mengurangi kesempatan mereka untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan ini, yang juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Jika siswa tidak memiliki keterampilan akademik dan non-akademik yang cukup, ini akan menghambat mereka dalam mempersiapkan masa depan mereka, baik itu untuk pendidikan yang lebih tinggi maupun dunia kerja.



Gambar 2: Lapangan Upacara, backgroundnya adalah kondisi kelas tampak belakang.

Faktor pendorong di balik kesediaan Malaysia dan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam kebijakan bersama dengan Indonesia guna menyediakan pendidikan bagi keluarga pekerja migran terletak pada kewajiban hukum dan ekonomi mereka. Meskipun belum meratifikasi Konvensi ILO tentang penghapusan diskriminasi dalam pendidikan, pemerintah Malaysia terikat dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1995 dan pemberlakuan Undang-Undang Anak pada tahun (2001) untuk menjunjung tinggi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan. Konstitusi Federal Malaysia juga mengabadikan hak asasi manusia yang mendasar, seperti kebebasan seseorang, larangan perbudakan dan kerja paksa, dan hak untuk mendapatkan pendidikan, yang juga berlaku untuk anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia harus menghormati penegakan hak asasi manusia dan memastikan pendidikan dan perkembangan anak-anak di negaranya, termasuk keluarga pekerja migran. Selain itu, pentingnya menetapkan kebijakan bersama untuk memberikan pendidikan kepada pekerja migran di Malaysia sangat terkait dengan kepentingan ekonomi, terutama bagi

Malaysia dan perusahaan-perusahaan swasta yang mempekerjakan pekerja migran. Malaysia dan Indonesia saat ini mendominasi pasokan minyak kelapa sawit global, masing-masing menyumbang 37,9% dan 53,4% dari pangsa ekspor dunia. Yang menarik adalah ekspansi produksi minyak kelapa sawit Indonesia yang pesat selama dekade terakhir, yang sebagian disebabkan oleh investasi Malaysia di Indonesia yang telah melampaui tingkat investasi Malaysia sejak tahun 2006. Mengingat faktor-faktor ekonomi ini, memastikan pendidikan dan daya saing anak-anak pekerja migran sangat penting untuk menjaga kualitas dan produktivitas angkatan kerja di kedua negara.

A. Dampak Sosial dan Kesulitan Integrasi Siswa di Sekolah Tidak Diakui

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan menjadi fondasi bagi perkembangan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Namun, tidak semua siswa memiliki akses ke sekolah yang diakui secara resmi oleh pemerintah atau masyarakat setempat. Keberadaan sekolah-sekolah tidak diakui ini menimbulkan tantangan signifikan bagi siswa, terutama dalam hal isolasi sosial dan kesulitan integrasi ke dalam masyarakat. Sekolah yang tidak diakui sering kali muncul di wilayah-wilayah yang kurang berkembang atau di komunitas marginal. Biasanya, sekolah-sekolah ini didirikan oleh organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, atau individu yang bertujuan memberikan akses pendidikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Namun, karena berbagai alasan, seperti kurangnya akreditasi, standar pendidikan yang tidak memenuhi kriteria, atau konflik politik, sekolah-sekolah ini tidak diakui secara resmi oleh otoritas pendidikan setempat.



Gambar 3. Salah satu CLC di kawasan Kundasang Sabah Malaysia (kiriman informan)

Meskipun memberikan manfaat berupa akses pendidikan dasar, status tidak diakui ini membawa konsekuensi serius bagi siswa. Salah satu dampak utama adalah keterbatasan akses ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan peluang kerja, karena ijazah dari sekolah-sekolah tersebut sering kali tidak diterima oleh institusi lain atau dunia kerja.

B. Isolasi Sosial: Pengaruh Terhadap Kehidupan Siswa

Siswa yang belajar di sekolah tidak diakui sering kali menghadapi isolasi sosial. Fenomena ini muncul karena beberapa alasan:

1. **Stigma Sosial** Sekolah tidak diakui sering dianggap sebagai "alternatif inferior" oleh masyarakat umum. Hal ini menciptakan stigma yang membuat siswa merasa malu atau minder ketika berinteraksi dengan teman sebaya yang belajar di sekolah resmi.
2. **Terbatasnya Interaksi dengan Lingkungan Luar** Kurikulum dan aktivitas sekolah tidak diakui sering kali terisolasi dari standar umum, sehingga siswa tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama, seperti lomba, seminar, atau program pertukaran pelajar. Hal ini membatasi peluang mereka untuk memperluas jaringan sosial.
3. **Perbedaan Latar Belakang** Banyak siswa di sekolah tidak diakui berasal dari komunitas terpinggirkan, seperti pengungsi, imigran ilegal, atau kelompok minoritas. Ketika mereka mencoba berintegrasi dengan masyarakat luas, perbedaan budaya, bahasa, dan status sosial sering menjadi penghalang.

Kesulitan Integrasi ke Masyarakat

Kesulitan integrasi siswa ke dalam masyarakat setempat menjadi tantangan besar lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. **Kurangnya Pengakuan Resmi** Ijazah atau sertifikat dari sekolah tidak diakui sering kali dianggap tidak sah. Akibatnya, siswa menghadapi hambatan ketika

ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau mencari pekerjaan formal.

2. **Kesenjangan Pengetahuan dan Keterampilan** Sekolah tidak diakui sering kali memiliki keterbatasan dalam sumber daya, seperti guru berkualitas, fasilitas, dan akses ke teknologi modern. Hal ini menciptakan kesenjangan keterampilan yang membuat siswa sulit bersaing dengan lulusan sekolah resmi.
3. **Diskriminasi** Di beberapa kasus, siswa yang berasal dari sekolah tidak diakui menghadapi diskriminasi langsung ketika mencoba masuk ke masyarakat. Mereka mungkin dianggap tidak memenuhi standar atau tidak memiliki "nilai" yang sama dengan lulusan sekolah formal.

Dampak Jangka Panjang

Konsekuensi dari isolasi sosial dan kesulitan integrasi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak jangka panjangnya:

- **Ketidaksetaraan Sosial yang Semakin Melebar** Ketika siswa dari sekolah tidak diakui tidak dapat mengakses peluang yang sama, ketimpangan sosial menjadi semakin dalam. Hal ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.
- **Potensi yang Tidak Termanfaatkan** Banyak siswa di sekolah tidak diakui sebenarnya memiliki potensi besar. Namun, tanpa pengakuan resmi, potensi ini sering kali tidak dimanfaatkan secara maksimal.

- **Ketegangan Sosial** Ketidakmampuan untuk berintegrasi dengan baik dapat menyebabkan siswa merasa terasing dari masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memicu ketegangan sosial dan bahkan konflik.

Solusi untuk Mengatasi Masalah

Untuk mengatasi isolasi sosial dan kesulitan integrasi siswa dari sekolah tidak diakui, berbagai pihak perlu bekerja sama. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan:

1. **Pengakuan dan Regulasi** Pemerintah harus menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan sekolah tidak diakui untuk mendapatkan pengakuan resmi. Hal ini dapat dilakukan melalui program akreditasi yang fleksibel namun tetap menjaga standar kualitas pendidikan.
2. **Peningkatan Kualitas Pendidikan** Sekolah tidak diakui perlu didukung untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Ini mencakup pelatihan guru, peningkatan fasilitas, dan penyediaan materi belajar yang sesuai dengan standar nasional.
3. **Program Integrasi Sosial** Organisasi masyarakat dan pemerintah dapat menyelenggarakan program yang mempromosikan integrasi siswa dari sekolah tidak diakui. Misalnya, kegiatan bersama yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang atau beasiswa khusus untuk siswa berprestasi.
4. **Kesadaran Masyarakat** Kampanye untuk mengurangi stigma terhadap sekolah tidak diakui juga penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa

pendidikan adalah hak semua orang, dan setiap upaya untuk memberikan pendidikan harus dihargai.

5. **Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan** Pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Kolaborasi ini dapat mencakup pendanaan, pelatihan, atau pengembangan kurikulum yang inklusif.

Siswa yang belajar di sekolah tidak diakui menghadapi tantangan besar dalam bentuk isolasi sosial dan kesulitan integrasi ke dalam masyarakat. Meskipun situasi ini kompleks, solusi yang tepat dan kolaborasi antara berbagai pihak dapat membantu mengatasi masalah ini. Dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada kebutuhan mereka, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal.

C. Siswa yang Kurang Mendapatkan Dukungan Pendidikan: Tantangan dan Solusi

Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun individu yang berkualitas dan masyarakat yang maju. Namun, tidak semua siswa mendapatkan dukungan yang cukup untuk mengejar pendidikan mereka, baik dari segi bimbingan guru maupun akses terhadap sumber daya pendidikan. Masalah ini sering kali diperburuk oleh kurangnya keterlibatan orang tua yang mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya pendidikan formal. Kondisi ini dapat secara signifikan memengaruhi kemampuan siswa untuk mencapai potensi penuh mereka.

Kurangnya Dukungan dari Guru

Guru memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman belajar siswa. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pembimbing dan motivator. Sayangnya, tidak semua siswa mendapatkan perhatian dan bimbingan yang memadai dari guru. Beberapa faktor yang memengaruhi hal ini meliputi:

1. **Rasio Guru dan Siswa yang Tidak Seimbang.** Di banyak sekolah, terutama di daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas, rasio antara guru dan siswa sangat tidak seimbang. Guru harus menangani terlalu banyak siswa dalam satu kelas, sehingga sulit memberikan perhatian individual kepada setiap siswa.
2. **Kurangnya Kompetensi Guru.** Dalam beberapa kasus, guru mungkin tidak memiliki pelatihan atau keterampilan yang memadai untuk mendukung kebutuhan belajar siswa yang beragam. Hal ini dapat menyebabkan siswa yang memiliki kesulitan belajar tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
3. **Motivasi Guru yang Rendah.** Faktor seperti gaji yang rendah, beban kerja yang berat, atau kurangnya penghargaan terhadap profesi guru dapat menyebabkan motivasi rendah. Akibatnya, kualitas pengajaran dan interaksi dengan siswa bisa menurun.

Keterbatasan Sumber Daya Pendidikan

Selain peran guru, sumber daya pendidikan juga menjadi elemen krusial dalam mendukung proses belajar siswa. Banyak siswa, terutama di daerah dengan akses

terbatas, menghadapi kendala besar dalam mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai. Beberapa kendala tersebut meliputi:

1. **Kurangnya Buku dan Materi Pembelajaran.** Buku teks, alat tulis, dan materi pembelajaran lain sering kali tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Bahkan di era digital, banyak siswa yang tidak memiliki akses ke perangkat teknologi seperti komputer atau internet untuk mendukung pembelajaran mereka.
2. **Fasilitas Sekolah yang Tidak Memadai.** Banyak sekolah tidak memiliki infrastruktur yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, atau ruang olahraga. Kondisi ini dapat menghambat proses belajar-mengajar dan memengaruhi motivasi siswa.
3. **Kesulitan Akses ke Pendidikan.** Di beberapa daerah, terutama yang terpencil, anak-anak harus menempuh jarak jauh untuk mencapai sekolah. Selain itu, faktor biaya sering menjadi penghalang bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Keterlibatan Orang Tua yang Kurang Optimal

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak adalah salah satu faktor kunci keberhasilan akademik. Namun, banyak orang tua yang tidak sepenuhnya menyadari atau memahami pentingnya pendidikan formal. Hal ini dapat disebabkan oleh:

1. **Kurangnya Kesadaran Akan Pentingnya Pendidikan.** Di beberapa komunitas, terutama yang tingkat pendidikan orang tuanya rendah, pendidikan formal mungkin tidak dianggap sebagai prioritas. Orang tua lebih fokus pada pekerjaan

sehari-hari atau menganggap pendidikan sebagai tanggung jawab penuh pihak sekolah.

2. **Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya.** Orang tua yang bekerja sepanjang hari atau menghadapi tekanan ekonomi mungkin tidak memiliki waktu atau energi untuk terlibat dalam pendidikan anak mereka, seperti membantu pekerjaan rumah atau menghadiri rapat orang tua.
3. **Kurangnya Pengetahuan Tentang Dukungan Pendidikan.** Beberapa orang tua tidak tahu bagaimana cara mendukung anak mereka dalam belajar. Mereka mungkin tidak memahami kurikulum atau metode belajar yang digunakan di sekolah.

Dampak Kurangnya Dukungan Pendidikan

Ketika siswa tidak mendapatkan dukungan yang cukup, baik dari guru, sumber daya, maupun orang tua, dampak negatifnya bisa sangat signifikan. Beberapa dampaknya meliputi:

1. **Penurunan Prestasi Akademik.** Siswa yang tidak mendapatkan dukungan cenderung kesulitan dalam mengikuti pelajaran, sehingga prestasi akademik mereka menurun.
2. **Motivasi Belajar yang Rendah.** Kurangnya perhatian dan bimbingan dapat membuat siswa kehilangan motivasi untuk belajar. Mereka mungkin merasa diabaikan atau tidak dihargai.

3. **Ketidakmampuan Mengembangkan Potensi.** Setiap siswa memiliki potensi unik yang harus dikembangkan. Tanpa dukungan yang memadai, potensi ini mungkin tidak akan pernah terwujud sepenuhnya.
4. **Tingkat Putus Sekolah yang Tinggi.** Banyak siswa yang akhirnya putus sekolah karena merasa pendidikan tidak relevan atau terlalu sulit tanpa dukungan yang cukup.

Solusi untuk Mengatasi Masalah

Mengatasi masalah kurangnya dukungan pendidikan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

1. **Meningkatkan Kualitas dan Jumlah Guru.** Pemerintah harus memastikan bahwa sekolah memiliki jumlah guru yang cukup dengan pelatihan yang memadai. Insentif dan penghargaan juga perlu diberikan untuk meningkatkan motivasi guru.
2. **Peningkatan Fasilitas Sekolah.** Sekolah harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti buku, perangkat teknologi, dan infrastruktur yang mendukung proses belajar.
3. **Pendidikan dan Kesadaran Orang Tua.** Kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan formal perlu dilakukan. Program pelatihan bagi orang tua tentang cara mendukung anak mereka juga bisa diimplementasikan.
4. **Kolaborasi dengan Masyarakat dan Organisasi.** Pihak swasta dan organisasi non-pemerintah dapat membantu menyediakan sumber daya atau program

tambahan untuk mendukung pendidikan, seperti beasiswa, pelatihan guru, atau fasilitas sekolah.

5. **Akses ke Teknologi.** Pemerintah dan organisasi terkait harus berupaya menyediakan akses teknologi dan internet yang merata, sehingga siswa dari daerah terpencil pun dapat mengikuti perkembangan pendidikan digital.

Pendidikan adalah hak dasar setiap anak, dan setiap pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, kita dapat membantu siswa mencapai potensi penuh mereka dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG PENDIDIKAN SISWA INDONESIA DI SABAH

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Sabah, Malaysia. Inisiatif ini termasuk menjalin hubungan diplomatik dengan Malaysia, berkolaborasi dengan LSM, dan mendirikan Community Learning Center (CLC) untuk menyediakan pendidikan (Yuvanti, 2021; Annisa & Nizar, 2022). Pemerintah juga telah berupaya memfasilitasi proses imigrasi, mengirim guru, dan memungkinkan siswa untuk menyelesaikan pendidikan mereka di Indonesia (Annisa & Nizar, 2022). Selain itu, aktor non-negara seperti Sabah Bridge telah memainkan peran penting dalam diplomasi pendidikan, berkontribusi pada pendirian Sekolah Indonesia Kota Kinabalu dan memberikan beasiswa repatriasi untuk pendidikan tinggi di Indonesia (Damayanti et al., 2023). Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak pendidikan sekitar 50.000 anak Indonesia di Sabah dari diskriminasi dan memastikan akses terhadap pendidikan yang layak (Yuvanti, 2021). Kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, bersama dengan LSM, telah berperan penting dalam mengatasi masalah ini.

Riset ini berfokus pada tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka di Sabah, Malaysia, khususnya terkait pendidikan. Karena kurangnya akses terhadap sumber daya pendidikan, banyak anak-anak Indonesia tidak dapat mengakses pendidikan berkualitas di Sabah. Riset ini mengusulkan sebuah

kebijakan kolaboratif antara pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mengatasi masalah ini dalam bentuk penyediaan fasilitas pendidikan dalam bentuk sekolah Indonesia Sabah yang beroperasi tidak hanya di pusat kota, tetapi di beberapa tempat yang awalnya sulit dijangkau oleh anak-anak TKI atau buruh migran. Kebijakan yang diusulkan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pendidikan keluarga pekerja migran Indonesia di Sabah. Riset ini berargumen bahwa pendekatan kolaboratif antara kedua pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah ini, karena diperlukan upaya terkoordinasi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh keluarga pekerja migran Indonesia. Secara keseluruhan, riset ini menyoroti pentingnya mengatasi masalah pendidikan bagi keluarga pekerja migran Indonesia di Sabah dan mengusulkan kebijakan kolaboratif sebagai jalan ke depan. Dengan meningkatkan hasil pendidikan keluarga-keluarga ini, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong integrasi sosial dan ekonomi mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Kesulitan yang dihadapi pekerja migran dalam memperoleh pendidikan diperparah oleh berbagai peraturan. Oleh karena itu, solusi harus ditemukan untuk mengatasi masalah ini dan memberikan mereka akses ke pendidikan yang berkualitas. Untuk lebih memahami pentingnya mengatasi masalah ini, maka perlu untuk melihat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kelompok **pertama** adalah para pekerja migran Indonesia yang merupakan aktor utama dalam masalah ini. Yang **kedua** adalah Pemerintah Indonesia, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa warganya memiliki akses terhadap pendidikan. Kelompok **ketiga** adalah pemerintah Malaysia, karena isu ini muncul di negara mereka. Sektor swasta juga memainkan peran, karena mereka bergantung pada para pekerja ini untuk produksi mereka. **Terakhir**, LSM adalah

pemangku kepentingan yang penting karena mereka berusaha menegakkan hak asasi manusia dan memberikan bantuan kemanusiaan.

Dengan menggunakan konsep Soft Power Diplomacy dan Perlindungan Hukum bagi Anak, pemerintah Indonesia telah mengupayakan perlindungan hukum dan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Sabah dari diskriminasi dengan menjalin hubungan diplomatik dengan Malaysia, LSM Humana Child Aid Society, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, dan Community Learning Center (CLC). Dalam melakukan hubungan diplomatik, suatu negara perlu mengirimkan diplomat dengan membawa misi yang telah diserahkan kepada mereka untuk disampaikan di negara penerima sehingga dapat menjadi kesepakatan baru dan saling menguntungkan bagi kedua negara. Upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak pendidikan anak TKI dimulai sejak tahun 2006 ketika Presiden RI berunding dengan Perdana Menteri Malaysia di Bukit Tinggi untuk membahas permasalahan TKI di Malaysia, termasuk hak-hak anak TKI yang berada di Malaysia. Kemudian mereka menandatangani MoU sebagai babak baru upaya Pemerintah Indonesia untuk menjamin hak-hak pekerja migran dan anak-anak mereka.

Perhatian utama yang perlu dikaji adalah perlunya penerapan kebijakan bersama bagi pekerja migran dan keluarganya. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (2015), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan. Pemerintah harus menjamin pemenuhan hak asasi manusia atas pendidikan, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa hak asasi pekerja migran terpenuhi. Kegagalan dalam memenuhi hak-hak ini dapat berdampak buruk pada produktivitas mereka, menurut sebuah survei yang mengindikasikan bahwa pekerja yang

bahagia cenderung lebih produktif (SgROI, 2015). Namun, dengan tidak adanya kebijakan bersama, pekerja migran dan keluarga mereka akan menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dasar mereka. Kesulitan pertama adalah mengakses dokumen yang lengkap karena sebagian besar dari mereka datang melalui jalur ilegal dan takut ditangkap dan dideportasi ketika mencoba untuk mengajukan permohonan dokumen legal. Selain itu, kondisi kehidupan di daerah terpencil, seperti ladang kelapa sawit di dekat Kota Kinabalu, yang berjarak 45 km, atau lebih dari 100 km dari kota, menyulitkan mereka untuk mendapatkan dokumen atau mengakses fasilitas pendidikan (Rustam, 2017).

A. Dimulai dengan Bantuan Buku

Sebagaimana yang terjadi di Community Learning Center (CLC) pada umumnya begitu juga guru-guru Humana melakukan pengajaran dengan bantuan buku-buku yang disediakan pihak Humana yang dibeli oleh orang tua. Peneliti berharap Pemerintah Indonesia dapat memberikan buku pelajaran dengan jumlah cukup, sehingga setiap anak bisa mendapatkan buku yang lebih memahami tentang Indonesia. Selain itu pendidik yang ditugaskan di Pusat Bimbingan Humana yang juga mengalami keterbatasan fasilitas pembelajaran menjadi terbantu. Selama ini pihak Humana hanya menyediakan kapur, kertas, dan ATK lainnya tapi tidak ada penyediaan media pembelajaran lain seperti alat-alat peraga, alat laboratorium sederhana, ataupun buku pengayaan. Sementara pemerintah Indonesia hanya mengirimkan pendidik. Selain dikirim pendidik pemerintah juga memberikan bantuan fasilitas pendidikan layaknya fasilitas yang diberikan kepada Learning Centre karena siswa Humana juga merupakan anak-anak Indonesia.

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebuah Negara. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan pendidikan wajar (wajib belajar) 9 tahun untuk setiap WNI, baik yang tinggal di NKRI maupun di luar negeri. Oleh karena itu, negara wajib memberikan layanan belajar kepada WNI khususnya yang tinggal di luar wilayah Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan wajar tersebut. UU tersebut juga mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Menjadi pendidik untuk anak-anak TKI di ladang sawit Sabah membuka mata peneliti bahwa belum semua anak Indonesia mengenyam wajar (wajib belajar) 9 tahun. Ini merupakan kewajiban pemerintah Indonesia untuk lebih banyak mendirikan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) khususnya di kawasan perkebunan sawit Sabah.

Tingkat kemajuan belajar seorang siswa sangat ditentukan pula oleh kualitas pendidiknya. Peneliti mohon pihak Kemendikbud harus lebih ketat dan selektif dalam menentukan tenaga pendidik yang akan dikirim ke Sabah agar mereka lebih siap dan mampu mendidik di lingkungan ladang dengan kehidupan yang keras dan fasilitas seadanya. Mereka juga perlu diberikan pelatihan dan pembekalan di awal dan selama masa tugas di Sabah dalam menghadapi kelas multi-grade karena tidak semua tenaga pendidik terbiasa menghadapi kondisi seperti ini di Indonesia.

Laporan penelitian ini meninjau bentuk-bentuk bantuan literasi dan dukungan pembelajaran yang dilakukan oleh perwakilan Pemerintah Indonesia (Kedutaan/Konsulat/KJRI) serta inisiatif terkait untuk anak-anak pekerja migran

Indonesia di Sabah (termasuk area perkebunan). Temuan utama: pemerintah perwakilan telah melakukan distribusi paket alat sekolah (buku, alat tulis, paket makan bergizi untuk kegiatan belajar), mendukung Community Learning Centres (CLC) dan program beasiswa/pendampingan, namun cakupan masih terbatas dibandingkan kebutuhan yang besar; terdapat peran penting LSM dan CLC sebagai mitra pelaksanaan. Rekomendasi menekankan peningkatan skema distribusi berkelanjutan, pendataan, kerjasama lintas-instansi, dan penguatan materi pembelajaran relevan untuk konteks migran. Banyak pekerja migran Indonesia di Sabah membawa/menempatkan anak-anak mereka di wilayah perkebunan dan permukiman rural di Sabah. Anak-anak ini mengalami tantangan akses pendidikan formal karena status migrasi, lokasi terpencil, dan keterbatasan ekonomi keluarga. Studi dan kajian terbaru menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi anak pekerja migran di Sabah masih bermasalah, sehingga keberadaan layanan non-formal (seperti Community Learning Centres — CLC) dan intervensi dari pemerintahan perwakilan menjadi penting.

Bantuan pemerintah (melalui KJRI/Konsulat RI dan program terkait) dapat dikelompokkan sebagai berikut: Perwakilan RI di Sabah (Konsulat/KJRI) secara berkala menyelenggarakan pembagian paket alat sekolah kepada anak-anak yang belajar di CLC dan sekolah Indonesia non-formal. Misalnya, Konsulat RI Tawau mendistribusikan paket alat sekolah (termasuk seperangkat alat sekolah dan paket makan sehat bergizi — MSB) kepada anak-anak pengguna CLC sebagai bagian kegiatan peringatan tertentu dan kunjungan pelayanan. Aksi-aksi serupa dilaporkan juga oleh KJRI Kota Kinabalu pada kegiatan kunjungan ke ladang/lokalitas tertentu. Ini menunjukkan pola intervensi langsung berupa distribusi kebutuhan dasar pendidikan. Pemerintah perwakilan

mendukung operasional CLC yang menjadi tempat utama belajar anak-anak migran. Dukungan bisa berbentuk pengadaan bahan ajar, peralatan pendidikan sederhana, dan fasilitasi kegiatan pemeriksaan administrasi (mis. pencatatan kelahiran yang memudahkan akses pendidikan formal nanti). CLC sering menjadi kanal utama agar bantuan buku dan media pembelajaran sampai ke penerima sasaran.

B. Skema Beasiswa, Pelatihan Guru, Dan Program Pendidikan Lanjutan

Selain bantuan fisik, KJRI juga memfasilitasi/mengumumkan program beasiswa dan seleksi siswa (contoh: pelepasan/rangkaian beasiswa yang diinformasikan KJRI untuk pelajar migran), serta program pelatihan guru CLC atau relawan belajar. Program-program ini mendukung kontinuitas pendidikan dan memperbesar peluang siswa migran melanjutkan jenjang berikutnya. Cakupan geografis: kegiatan terlihat terpusat pada wilayah-wilayah dengan konsentrasi PMI (pekerja migran Indonesia) seperti Tawau, Sandakan, dan area ladang Pamol di Sabah. Target penerima: anak-anak yang belajar di CLC, siswa sekolah dasar Indonesia non-formal, dan keluarga PMI yang identifikasi oleh perwakilan. Laporan Konsulat RI Tawau mencatat pembagian kepada 106 anak di satu kegiatan; sedangkan KJRI Kota Kinabalu melaporkan kegiatan yang menjangkau ratusan peserta di program beasiswa/pendukung pendidikan. Ini menggambarkan skala yang bersifat batch/periodik — bukan program universal tetap. Kendala utama: Pendataan dan jangkauan jumlah anak Indonesia di Sabah yang membutuhkan sangat besar; distribusi bersifat episodik sehingga tidak semua anak tercakup. Penelitian ini mencatat skala masalah (puluhan ribu anak) dan tingginya variabilitas akses antar wilayah. Status administrasi dan peraturan setempat: kehadiran anak-anak di wilayah

migran kadang terhambat oleh status imigrasi, sehingga akses ke sekolah formal lokal terbatas. Ini membuat CLC dan bantuan non-formal menjadi solusi sementara, bukan solusi permanen. Sumber daya dan kontinuitas: ketersediaan buku dan media ajar yang relevan (bahasa Indonesia vs bahasa pengantar lokal), serta kapasitas tenaga pengajar CLC, masih memerlukan penguatan berkelanjutan.

Gema Cita merupakan sebuah program fasilitasi pelayanan pendidikan lanjutan bagi anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia (Sabah dan Sarawak) untuk melanjutkan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat (Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah) di berbagai sekolah di Indonesia. Anak-anak PMI yang diberikan pelayanan pendidikan itu adalah mereka yang lahir di Malaysia karena ikut orang tua mereka yang bekerja di ladang-ladang sawit. Pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mereka selesaikan di SIKK atau di berbagai *Community Learning Center* (CLC) yang tersebar di Sabah dan Sarawak. Program Gema Cita secara informal sudah berjalan sejak 2013. Cikal bakalnya muncul dari rasa peduli yang sangat tinggi dari guru-guru SIKK-CLC yang pernah bertugas di Sabah, yang kemudian membentuk sebuah lembaga nirlaba bernama Sabah Bridge (SB). Tujuan awalnya untuk membantu para pelajar alumni SMP SIKK-CLC untuk melanjutkan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA di sekolah-sekolah di Indonesia secara mandiri.

Dalam perjalanannya, program ini mendapat sambutan sangat positif dari banyak pihak karena hasil yang dicapai sangat baik. Terbukti makin banyak pelajar alumni SMP SIKK-CLC yang setiap tahun melanjutkan pendidikan di Indonesia melalui jalur mandiri.

Mulai 2017, program ini dikelola dan dikoordinasi secara lebih baik yang melibatkan SB dengan SIKK, Perwakilan RI di Kuala Lumpur dan Sabah. Malah pesertanya makin bertambah dan sebagian dibantu dengan pemberian beasiswa melalui jalur Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem) maupun jalur Yayasan. Jadi ada tiga jalur pelayanan pendidikan yang difasilitasi, (1) Jalur Adem, peserta yang lulus seleksi akan diberi beasiswa penuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk melanjutkan sekolah sampai tamat di sekolah-sekolah di Indonesia yang sudah ditetapkan; (2) Jalur Yayasan, beberapa yayasan/lembaga pendidikan di Indonesia yang sudah menjadi mitra SB-SIKK akan menanggung sepenuhnya semua biaya pendidikan (Tipe A) dan ada juga beberapa yayasan lain tetapi tidak menanggung sepenuhnya biaya tersebut (Tipe B); dan (3) Jalur Mandiri, peserta hanya difasilitasi kelengkapan dokumen perjalanan dan kelanjutan sekolahnya tanpa diberikan bantuan beasiswa. Semasa Covid-19 (2020-2022), program ini tetap berjalan, malah makin melebar dengan keikutsertaan perwakilan dari CLC Sarawak serta disusul Sanggar Belajar (SB) di Semenanjung (Selangor dan Johor Bahru). Penyelenggaraannya juga semakin terkoordinasi lebih baik, melibatkan SIKK, KBRI Kuala Lumpur, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Kuching, KRI Tawau dan sekolah-sekolah mitra.

Beasiswa Adem sepenuhnya berasal dari anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek RI. Tim panitianya di bawah SIKK dengan nama “Beswan Repatriasi Anak PMI di Malaysia”, yang di tahun 2022 mengganti nama program menjadi “Generasi Maju Cinta Tanah Air (Gema Cita)”. Setelah sepuluh tahun berjalan (2013-2023), tercatat sebanyak 3.477 alumni CLC SMP SIKK-CLC yang sudah berhasil diberikan pelayanan pendidikan lanjutan melalui Program Gema Cita Jalur Adem

(2.207) dan Jalur Yayasan (1.270). Sebagian dari mereka malah sudah kuliah dan menjadi sarjana di berbagai perguruan tinggi di Indonesia atau di luar negeri, atau bekerja di berbagai tempat. Pada tahun ini, program serupa kembali diselenggarakan yang diikuti oleh 567 alumni CLC SMP SIKK, CLC dan SB di Malaysia (Sabah 536; Sarawak 22; Semenanjung 9). Mereka berjuang untuk mencari tempat belajar lanjutan di lebih dari 90an sekolah tujuan Jenjang SMA/SMK/MA yang tersebar luas di 11 provinsi di Indonesia (Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Lampung). Untuk Wilayah Malaysia, kuota beasiswa Adem tahun ini berjumlah 375. Pihak panitia di Sabah sudah menyusun serangkaian jadwal kegiatan secara rapi: sosialisasi (Desember 2023), pendaftaran (Maret 2024), seleksi & pembuatan paspor (2-5 Mei 2024), pengumuman (17 Mei 2024), pengurusan *special pass* di Kantor Imigrasi Malaysia (Juni 2024), persiapan keberangkatan (Juni 2024) dan pengantaran/keberangkatan ke sekolah tujuan (Juli 2024). Pada 2-5 Mei 2024, sebagian besar peserta sudah mengikuti seleksi yang diselenggarakan di Sabah (SIKK) dan Sarawak (CLC Rajawali, Bintulu). Untuk Wilayah Semenanjung (Johor Bahru) akan menyusul. Proses seleksi meliputi kelengkapan dokumen administratif, tes kemampuan literasi dan numerasi, tes psikologi, wawancara dan uji bakat, tes keagamaan dan budi pekerti serta tes kesehatan. Para penguji terdiri dari unsur Guru SIKK, Guru Bina CLC dan Tim dokter profesional. Untuk yang di Sabah, di tengah proses seleksi, semua peserta juga sekaligus memproses penerbitan paspor di KJRI Kota Kinabalu dan KRI Tawau.

C. Dampak yang teramati

Peningkatan partisipasi belajar: laporan-laporan kegiatan menunjukkan bahwa setelah pembagian alat sekolah dan paket MSB, ada peningkatan partisipasi di CLC—anak-anak lebih rutin datang karena kebutuhan dasar terpenuhi. Jalur administrasi terbuka: kegiatan pencatatan kelahiran dan layanan administratif yang difasilitasi perwakilan mempermudah anak memperoleh dokumen dasar yang penting untuk akses pendidikan formal di masa depan. Pendataan terpadu dan database penerima: membuat registrasi terpusat untuk anak pekerja migran di Sabah (kerja sama KJRI/Konsulat, dinas terkait, LSM, dan perwakilan lokal) sehingga distribusi buku/alat tulis bisa lebih terarah dan berkelanjutan. Skema bantuan berkelanjutan, menyusun skema tahunan—mis. paket semesteran buku dan alat tulis untuk anak CLC—dengan target kuantitatif per wilayah. Pengadaan bahan ajar kontekstual: mempersiapkan bahan ajar bilingual (Indonesia — bahasa setempat/Malaysia) dan media pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan kurikulum CLC agar transisi ke sekolah formal lokal lebih mulus. Penguatan kapasitas CLC dan pelatihan guru: tingkatkan pelatihan guru-relawan CLC agar pemanfaatan bahan ajar dan media pendidikan menjadi efektif. Pendanaan multistakeholder: mendorong mekanisme pendanaan kolaboratif (Kementerian/Lembaga terkait, KJRI, diaspora, dan NGO internasional) untuk memastikan kesinambungan bantuan. Kemudian melakukan Monitoring dan evaluasi dengan menerapkan sistem M&E sederhana ini untuk mengukur penerimaan bantuan, frekuensi kehadiran siswa, dan hasil pembelajaran jangka menengah.

Pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatik di Sabah telah menunjukkan komitmen nyata—melalui distribusi buku/alat tulis, paket MSB, dukungan CLC, dan program beasiswa—untuk membantu anak pekerja migran Indonesia agar memperoleh

akses pendidikan. Namun skala masalah dan hambatan struktural menuntut pendekatan lebih terencana, berkelanjutan, dan berbasis data. Dengan penguatan pendataan, pendanaan multi-pihak, serta fokus pada kualitas bahan ajar dan kapasitas pengajar, intervensi ini dapat bertransformasi dari bantuan episodik menjadi sistem dukungan pendidikan yang berkelanjutan.

Program beasiswa dan repatriasi oleh Pemerintah Indonesia untuk anak-anak pekerja migran di Sabah merupakan langkah nyata pemenuhan hak pendidikan dan perlindungan warga negara. Pelaksanaan telah berhasil memfasilitasi ratusan anak untuk kembali dan melanjutkan sekolah di Indonesia. Namun untuk memastikan hasil jangka panjang diperlukan perbaikan verifikasi administrasi, program pembelajaran pra-kedatangan, dan penguatan kerjasama antar-lembaga agar cakupan dan mutu layanan meningkat secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa masalah administrasi kependudukan yang tidak dimiliki oleh sebagian besar siswa menjadi penghalang utama bagi akses pendidikan formal di Sabah Malaysia. Bahwa keterbatasan akses ini mendorong Pemerintah Indonesia membentuk CLC sebagai alternatif pendidikan. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait pengakuan resmi dari Pemerintah Malaysia yang belum diberikan kepada CLC. Selain itu, bahwa motivasi belajar siswa cukup fluktuatif, dipengaruhi oleh stigma sosial karena bersekolah di institusi yang tidak diakui secara resmi oleh pemerintah Malaysia. Guru-guru yang bertugas di CLC juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan kelas dan efektivitas pengajaran. Kepala Sekolah menekankan pentingnya efikasi diri guru dan manajemen kelas yang baik sebagai faktor kunci keberhasilan pembelajaran di CLC. Kepala Sekolah menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi guru CLC untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Keberhasilan CLC juga ditentukan oleh manajemen yang baik dan peningkatan kapasitas tenaga pengajar. Upaya ini perlu didukung oleh kolaborasi dengan universitas dan lembaga pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan kompetensi guru. Pendidikan yang diselenggarakan di CLC menjadi pilihan penting namun belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh kebutuhan siswa. Diperlukan langkah strategis seperti peningkatan kerja sama bilateral, pengakuan institusi pendidikan informal seperti CLC, serta optimalisasi peran sektor swasta dalam pemenuhan fasilitas dan sumber daya. Selain itu, pendidikan bagi orang tua tentang pentingnya pendidikan formal bagi

anak harus terus digalakkan. Secara teoritis, temuan ini membahas tentang pentingnya dukungan sosial dalam perkembangan anak, serta sejalan dengan teori kolaborasi lintas batas yang menekankan pentingnya keselarasan kepentingan untuk keberhasilan program di wilayah perbatasan.

Sekolah Indonesia yang tidak diakui di Sabah, khususnya yang berbentuk *Community Learning Center* (CLC), hadir sebagai solusi alternatif untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia. Namun, statusnya yang tidak diakui secara resmi oleh pemerintah Malaysia menyebabkan keterbatasan dalam akses fasilitas, sumber daya, dan peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Siswa di sekolah yang tidak diakui ini menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan sarana prasarana, minimnya tenaga pendidik berkualitas, kesulitan transportasi, serta hambatan administratif berupa ketiadaan dokumen resmi. Kondisi ini memengaruhi motivasi, prestasi akademik, dan perkembangan keterampilan mereka.

Minimnya pengakuan resmi dan stigma sosial membuat siswa mengalami isolasi sosial, kesulitan integrasi dengan masyarakat setempat, serta tekanan psikologis yang berpengaruh terhadap kesehatan mental dan rasa percaya diri. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya seperti pembentukan CLC, pengiriman guru, penyediaan bantuan sarana, dan kerja sama dengan Pemerintah Malaysia maupun pihak swasta. Namun, keterbatasan kebijakan, daya jangkauan, dan jumlah tenaga pengajar masih menjadi tantangan utama. Rendahnya pemahaman sebagian orang tua mengenai pentingnya pendidikan formal, ditambah fokus pada kebutuhan ekonomi keluarga,

mengurangi dukungan yang diberikan kepada anak. Padahal keterlibatan keluarga dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan siswa.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan:

1. **Penguatan Status Hukum dan Kerja Sama Bilateral.** Pemerintah Indonesia perlu terus memperjuangkan pengakuan legal CLC melalui diplomasi bilateral dan mekanisme kerja sama internasional, agar lulusan memiliki ijazah yang diakui kedua negara. Selanjutnya melakukan Peningkatan Kualitas Pendidikan
 - Menambah jumlah guru berkualitas melalui program seleksi, pelatihan, dan insentif yang memadai.
 - Menyediakan fasilitas belajar yang lebih layak, termasuk buku, teknologi pembelajaran, dan akses internet.
2. Program Dukungan Psikososial, menyusun program bimbingan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, dan pelatihan keterampilan sosial untuk membantu siswa membangun rasa percaya diri dan mengatasi isolasi sosial.
3. Pemberdayaan Orang Tua dan Komunitas dengan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan bagi orang tua mengenai pentingnya pendidikan formal, serta melibatkan komunitas dalam pengelolaan sekolah agar rasa memiliki dan dukungan terhadap CLC semakin kuat.
4. Kolaborasi Multi Pihak dengan mendorong sinergi antara pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat untuk mendukung pembiayaan, penyediaan fasilitas, dan

pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa di wilayah perbatasan.

5. Pemanfaatan Teknologi Pendidikan dengan mengembangkan model pembelajaran daring dan hibrida yang dapat menjangkau siswa di lokasi terpencil, sekaligus memperkaya pengalaman belajar mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Allerton, C.** (2020). *Invisible children? Non-recognition, humanitarian blindness and other forms of ignorance in Sabah, Malaysia*. [SAGE Journals](#).
- Anna Yulia Hartati dan Rofi'atul Andawiyah, 2020, *DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH PENDIDIKAN ANAK TKI DI SABAH MALAYSIA*, *SPEKTRUM*, Vol17, No2, p-ISSN: 1829–6580
- Annabela Assyfa Wibowo, (2023), *Altruisme dalam Membangun Solidaritas Sosial Komunitas Relawan*, [Vol 10 No 1, Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Universitas Negeri Padang](#), DOI: <https://doi.org/10.24036/scs.v10i1.450>
- Annisa, R. N., & Nizar, M.** (2022). *The Indonesian Government's Diplomacy in Fulfilling the Education Rights of the Children of Indonesian Migrant Workers in Tawau Sabah Malaysia*.
- Antara. (2019, April 12). Sekolah Anak Indonesia di Malaysia Kesulitan Buku Pelajaran. *Medcom.id*.
- Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2023, December 4). *minority*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/minority>
- Budiatun, D. (2013, September 11). Sepenggal Kisah Pendidik Indonesia... *journal_edu.424*. https://journal424.wordpress.com/2013/09/11/sepenggal-kisah-pendidik-indonesia-untuk-anak-anak-tenaga-kerja-indonesia-tki-pada-pusat-bimbingan-humana-house-85-di-ladang-labuk-sandakan-sabah-malaysia/?utm_source=chatgpt.com
- Desy Anastasia Christie, 2016, *UPAYAI NDONESIA DALAM MENANGANI PENDIDIKAN ANAK TENAGA KERJA INDONESIA DI SABAH MALAYSIA*, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2016,4 (4) 1161-1176 ISSN 2477-2623 (online), ISSN2477-2615(print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id
- Dupéré, V., Leventhal, T., Dion, E., Crosnoe, R., Archambault, I., & Janosz, M. (2015). *Stressors and Turning Points in High School and Dropout: A Stress Process, Life Course Framework*. *Review of Educational Research* 85(4), 591–629. <https://doi.org/10.3102 /0034654314559845>
- Duraisingam, T. J., Veerakumaran, B., Arumugam, M., & Rafique, R.** (2024). *Right to education for children of Indonesian migrant workers living in plantations in Sabah – understanding the gaps*. [ResearchGate](#).
- Fauziah, P., Dewi, A., & Trisanti, T. (2023). *Pelatihan Parenting sebagai Upaya Pemberdayaan Pengelola SPS di CLC Kinabalu*. *Jurnal Obsesi : Jurnal*

- Pendidikan Anak Usia Dini, 7(5), 5973-5982.
doi:<https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.4345>
- Fryer, L. 2014. In the face of adversity: factors affecting dropout, re-engagement and resilience among at-risk youth at an alternative high school. Master thesis, Vancouver Island University. <http://hdl.handle.net/10613/2015>
- Garcia, E. 2020. *A Journey of Determination and Hope: Returning to High School After Dropping Out*. Dissertation, University of the Pacific. https://scholarlycommons.pacific.edu/uop_etds/3672
- Irzum Fariyah, Afina Izzati, (2016) *PENDIDIKAN KAUM MINORITAS*, EDUKASIA, Vol 11, No 1, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v11i1.805>
- Jatmika, M. I. (2023). Indonesia-Malaysia collaborative policy to address the issue of education for Indonesian migrant worker Family in Sabah Malaysia. International Relations on Indonesian Foreign Policy Conference 2022. NST Proceedings. pages 22-28. doi: 10.11594/ nstp.2023.3404
- Kaelan, (2005), *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma)
- Kumalasari, A., & Huwae, A. (2023). *Bangkit: mengungkap resiliensi pada remaja drop out*. Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 9(1), 298-314. doi:<http://dx.doi.org/10.29210/1202322855>
- L. R. Gay, (1996), *Educational Research: Competencies for Analysis and Application*, Fifth Edition (United States of America: Florida International University)
- Lansford, J. E., Dodge, K. A., Pettit, G. S., & Bates, J. E. (2016). *A Public Health Perspective on School Dropout and Adult Outcomes: A Prospective Study of Risk and Protective Factors from Age 5 to 27 Years*. Journal of Adolescent Health, 58(6), 652–658. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.01.014>
- M.Arif Nasution, 2021, *Orang Indonesia di Malaysia (Menjual Kemiskinan membangun Identitas)* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar)
- Miles, M. B., Huberman, A Michael, & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition*.
- Muhammad Nizar Hidayat1 , Nur Hariyani, (2022), Mewujudkan Pemerataan Pendidikan: Studi Kasus Community Learning Center (CLC) di Perbatasan Indonesia-Malaysia, Global Focus Vol. 2 No. 2, pp. 138-148, DOI:[10.21776/ub.jgf.2022.002.02.4](https://doi.org/10.21776/ub.jgf.2022.002.02.4)
- Paksi, H. P. (2013, August 27). Biografi Perjalanan Guru Indonesia... *journal_edu.424*.
- Puji Yanti Fauziah, Adin Ariyanti Dewi, Trisanti Trisanti, 2023, *Pelatihan Parenting sebagai Upaya Pemberdayaan Pengelola SPS di CLC Kinabalu*, Volume 7

Issue 5, Pages 5973-5982 Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, ISSN: 2549-8959 (Online) 2356-1327 (Print)

- Pusztai, G. (Eds.), (2023). *Sociology of Education – Theories, communities, contexts*. Debrecen University Press.
- Saleh, Sirajuddin. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Pustaka Ramadhan: Bandung.
- Sjaifudian Siswanda, H. (2025, November 6). Pendidikan Anak di Sabah Malaysia Memprihatinkan. *Hetifah.id*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Tharani, L., Chan, D. Z., Hassan, F., & Majid, H.** (2022). *Undocumented: An examination of legal identity and education provision for children in Malaysia*. PLOS ONE. [ResearchGatePMC](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241111).
- Vincze, Zs. (2023). *Sociology of Education – Theories, communities, contexts* – Review. [Review of the book *Sociology of Education – Theories, communities, contexts*, by Pusztai, G. (Eds.)] Central European Journal of Educational Research, 5(1), 107–109. <https://doi.org/10.37441/cejer/2023/5/1/12813>
- Wahyudin, U., Hufad, A., & Purnomo, P. (2020). Management of the Community Learning Center (CLC) program in Kinabalu Sabah Malaysia. DOI:[10.1201/9781003107279-45](https://doi.org/10.1201/9781003107279-45)
- Yayuk, E., & Ekowati, D. W. (2017). *Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran Matematika Menggunakan Budaya Indonesia Pada Lesson Study di SD Indonesia KBRI Bangkok Thailand*. JINoP (Jurnal Inovasi Pembelajaran), 3(1), 459–468. <https://doi.org/10.22219/jinop.v3i1.3966>
- Yuvanti, D.A. (2021). Indonesian Government's Efforts to Cooperate with Malaysia's Government in Protecting Educational Rights of Indonesian Migrant Workers Children (Case Study: Children of Indonesian Migrant Workers in Sabah). *Journal of ASEAN Dynamics and Beyond*.
- Zein, Y., Syapriallah, A., & Rohman, A. (2017). *LEGAL FRAMEWORK IN THE FULFILMENT OF RIGHT TO EDUCATION AS CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENS IN BORDER AREA OF NUNUKAN-NORTH KALIMANTAN PROVINCE (Comparison Study and Legal Framework of Right to Education of Citizens in Border Area of Indonesia-Sabah, Malaysia)*. Tadulako Law Review, 2(2), 159-183. Retrieved from <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TLR/article/view/9258>